

SOSOK DAN RANAH IJTIHAD

Oleh; Aditiawarman Adnan

Dosen UIN Imam Binjol Padang

Abstrak

Ijtihad dapat dikatakan sebagai mesin penggerak dinamika hukum Islam dalam menyelesaikan fenomena hukum yang muncul sepanjang sejarah kehidupan manusia di bumi ini. Kegiatan ijtihad dapat dilakukan secara kolektif (ijtihad jamma'y) dan personal (ijtihad fardy) dengan pendekatan bayani maupun ra'yi.¹ Ijtihad merupakan sarana yang paling efektif untuk mendukung tetap tegak dan eksisnya hukum Islam serta menjadikannya sebagai tatanan hidup yang up to date yang sanggup menjawab tantangan zaman (shalihun li kulli zaman wa makan). Melakukan ijtihad bagi seorang mujtahid merupakan kewajiban yang dapat melahirkan produk hukum taklifiyyah dan wadh'iyyah pada ranah zanni. Ijtihad baru akan berfungsi dan berdayaguna jika ijtihad dilakukan oleh para ahlinya (mereka yang memenuhi persyaratan dan dilakukan pada tempatnya sesuai dengan ketentuan yang telah diakui kebenaran dan kesalahannya). Mujtahid disyaratkan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah dalam berbagai aspeknya, tarekh tasyri', memahami masalah yang sudah disepakati ulama, memahami bahasa Arab, dan mengetahui ushul fiqh dan lainnya. Ijtihad akan membawa keselamatan kejayaan bagi Islam dan umatnya, apabila hal itu dilakukan oleh yang memenuhi persyaratan dan dilakukan pada ranah diluar nash yang qath'i. Mujtahid secara sederhana dapat dibedakan pada mujtahid mutlaq dan mujtahid muntasib. Namun didalam perkembangannya dapat diturunkan kepada berbagai level seperti; mujtahid muthlaq ghairu mustaqil, mujtahid filmazhab, mujtahid tarjih dan mujtahid fatwa. Fatwa adalah pendapat hukum yang diberikan oleh seorang ulama (faqih) kepada seseorang atau masyarakat yang mengajukan pertanyaan menyangkut hukum kasus yang sedang dialaminya tanpa mengikat. Fatwa sering sekali dipadankan dengan terma fiqhi, dan hukum Islam. Fikih dan Fatwa memang sama-sama produk yang dilahirkan melalui instrumen (mesin) ijtihad, namun fatwa memiliki substansi yang tidak dimiliki fiqhi, dan hukum. Satu hal yang menjadi karakter fatwa adalah bahwa ia bersifat kasuistik sementara yang lain adalah normatif. Dengan demikian Ijtihad dapat dijadikan alat untuk menjawab masalah-masalah yang semakin komplit dari waktu ke waktu baik dalam bentuk reaktualisasi, ataupun aktualisasi hukum Islam. Untuk menggalakkan ijtihad guna menjadikan hukum Islam ini dinamis dan lincah perlu digalakkan studi fiqh perbandingan dan ushul fiqh perbandingan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya perguruan

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang paripurna diyakini oleh pemeluknya sebagai agama *rahmatan li al-'alamin*. Untuk memahami Islam, Allah telah memberikan pedoman berupa al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber utama dari ajaran Islam. Al-Qur'an yang jumlahnya lebih dari enam ribu ayat tidak diterima oleh Nabi Muhammad saw. dalam

¹Ijtihad bayani adalah penggalan hukum Islam dengan menganalisis lafadz-lafadz yang digunakan sebagai dalil, melalui pendekatan bahasa. Ijtihad al-Ra'yi dilakukan dengan menggunakan akal fikiran, baik dengan mengqiyaskan, istihsan, istishab, masalah maupun yang lainnya.

bentuk satu buku, melainkan himpunan wahyu-wahyu Allah yang diterima dalam jangka waktu hampir dua puluh tiga tahun. Al-Qur'an juga diturunkan bukan dalam suasana kosong budaya, melainkan untuk sekelompok masyarakat pada zaman tertentu, dengan sejarah dan latar belakang kebudayaan tertentu, dan jugalokasi tertentu. Wahyu-wahyu tersebut diterima oleh Nabi Muhammad saw. di tengah masyarakat Arab, di Jazirah Arabia, dan pada tingkat kemajuan dan latar belakang budaya setempat pada abad ketujuh masehi.

Tujuan utama disyariatkan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia dan sekaligus menghindari kemafsadatan. Segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an atau Sunnah maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut. Wahyu-wahyu Allah khususnya yang mengenai kemasyarakatan, biasanya diterima oleh Nabi sebagai tanggapan atau petunjuk dalam menghadapi masalah atau situasi yang timbul pada waktu itu. Konsepsi atau formula yang diberikan wahyu tersebut tentunya sangat relevan dengan situasi sosial budaya serta tingkat kemajuan peradaban dan intelektual masyarakat pada waktu itu. Seiring perkembangan dan perubahan zaman, maka ijtihad sebagai upaya untuk mengaktualisasikan ajaran Islam dalam upaya menghadapi dinamika kehidupan kemanusiaan, sangat dibutuhkan.

Masyarakat sebagai sebuah komunitas akan senantiasa mengalami perubahan, bersifat dinamis, dan tidak berkarakter statis. Perubahan masyarakat itu dapat terjadikapan dan di mana pun manusia itu berada. Setiap bentuk perubahan, cepat atau lambat, selalu menuntut perubahan dan pembaharuan dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya bidang hukum yang merupakan salah satu institusi penting bagi kehidupan umat manusia. Jangankan perubahan antara masa sekarang dengan masa lebih dari seribu tahun lalu, masa hidup imam al-Syafi'i saja memerlukan dua pendapat berbeda yang disebut dengan *qaul qadim* (pendapat imâm al-Syafi'i ketika di Iraq, sebelum pindah ke Mesir) dan *qaul jadid* (pendapat imam al-Syafi'i ketika telah pindah ke Mesir).²

Setelah Rasulullah wafat, keperluan kepada ijtihad semakin meningkat. Kalaupun pada masa Rasulullah di samping ada ijtihad, berbagai persoalan masih dapat dikembalikan dan dikonsultasikan kepada beliau, yang kemudian akan beliau jawab dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau, atau dengan ketetapan beliau sendiri sebagai Rasul yang mempunyai otoritas dalam menentukan hukum. Tetapi setelah wafatnya Rasulullah keadaannya menjadi lain, tanggung jawab sepenuhnya untuk memecahkan segala persoalan jelas terpicul kepada umat yang ditinggalkannya. Kedudukan Nabi Muhammad Saw. sebagai Nabi terakhir nampaknya dipahami oleh umat Islam secara kreatif. Untuk itulah, mereka dengan segala upaya dan kesungguhan, berijtihad, mencari pemecahan masalah, dengan selalu mengambil inspirasi dan menangkap pesan-pesan universal dari al-Qur'an dan Sunnah. Dalam ijtihad kadangkala terlihat, umat membawa pemecahan yang berbeda, bukan saja di kalangan mereka, bahkan juga dengan praktek-praktek yang telah berlaku di masa Rasulullah.

²A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 32

Pada masa berikutnya muncul sederetan mujtahid kenamaan sampai era keemasan, kemudian dikenal dengan *al-a'immah al-arba'ah* (empat serangkai imam madzhab) yaitu: Imam Abu Hanifah ibn Nu'man (80H / 699M - 150H / 772M), Imam Malik ibn Anas (93H / 712M - 179H / 798M), Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (150H / 766M - 204H / 820M), dan Imam Ahmad ibn Hanbal (164H / 780M-241H / 855M). Mereka telah melahirkan pemikiran dankarya yang sangat berharga bagi umat Islam berikutnya seperti, Ilmu fiqh dan ushul fiqh. Setelah diselingi masa *taqliddan jumud*³ yang juga sering disebut periode tertutupnya pintu ijtihad yang berlangsung dari pertengahan abad ke IV Hijriah sampai akhir abad ke XIII Hijriah,⁴ kemudian bermunculan pulapara pembaharu (mujaddid) yang memotifasi dan menggerakkan pembaharuan, seperti diantara mereka adalah Syekh Muhammad 'Abduh (1849 -1905 M) dan al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (1865 - 1935 M).

Karena kebudayaan Islam terus berkembang dari waktu ke waktu dengan segala probematika dan masalahnya sesuai dengan perkembangan pikiran manusia, sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan baru dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini adalah suatu fenomena yang akan terus terjadi yang tidak bisa dihindari oleh kaum muslimin.

Kalaupun jawabannya tidak didapatkan di dalam nash, maka untuk memecahkan persoalan itu, haruslah para ulama mencurahkan segala daya dan upayanya untuk menetapkan hukum-hukum yang muncul seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman. Penyelesaiannya tentulah dengan metode-metode sistematis dan adekuat, dengan memegang teguh al-qur'an dan hadits sebagai referensi utama kaum muslimin, dan kearah inilah geraknya mesin ijtihad.

Persoalan yang muncul setelah memperhatikan uraian diatas adalah;

- a. Seperti apa sosok (profil) ijtihad tersebut ?
- b. Apakah ijtihad dapat dilakukan oleh siapa saja?
- c. Apakah semua persoalan hukum dapat dijawab dengan ijtihad?
- d. Seperti apakah sejarah dan perkembangan Ijtihad?
- e. Sperti apa kaitan ijtihad dengan Taqlid?

Mengingat begitu pentingnya ijtihad, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, karena pesan al-Quran tidak semuanya berbentuk operasional yang dapat diterapkan dari waktu ke waktu maka paper ini mencoba melihat lebih jauh, sosok ijtihad tersebut, seperti; pengertian, syarat-syarat berijtihad dan mujtahid, ranah ijtihad, sejarah perkembangan ijtihad, kaitan ijtihad dengan fatwa, taqlid dan bentuk-bentuk

³*Taqlid* merupakan suatu istilah yang asalnya dipakai untuk menunjuk pada jenis rujukan kepada sahabat-sahabat Nabi [yakni taqlid kepada sahabat Nabi] yang telah menjadi tradisi dalam madzhab hukum klasik, [namun] sekarang berarti penerimaan yang tanpa ada pertanyaan terhadap doktrin-doktrin dari madzhab-madzhab dan tokoh yang ada. Era taqlid dengan batasan kemandegan berpikir secara total sebenarnya tidak pernah terjadi. Pemikiran dan perkembangannya yang dilakukan oleh para ulama selalu berjalan. Bahkan hasil kajian sejarah menunjukkan bahwa aktivitas para ulama berikutnya, setelah anggapan tertutupnya pintu ijtihad, justru tidak kurang kreatif ketimbang aktifitas para ulama pendahulunya. Lihat A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 42-43

⁴Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang; 1987), h. 206

penerapan ijtihad di era kontemporer, dengan topik; "Paradigma Ijtihad dan Perkembangannya".

B. Pengertian Ijtihad

Al-Ghazali juga menjelaskan secara etimologis, *ijtihad* berakar pada kata : "*ja ha da*" yang berarti: kesulitan atau "kesusahan" Kata ijtihad berasal dari kata "*al-juhdu*" (dengan *dhammah* atau *fathah* huruf jim berarti kemauan dan kesulitan "*masyaqqah*". Kata ini sepola dengan *nafah*, misalnya ungkapan "*wajtahid fil amri*" yang berarti mencurahkan kemampuan dan daya mencapai sesuatu guna mencapai apa yang diinginkan yang berupa tujuan akhir. Kata "*al-Juhdu*" tersebut tidak dapat digunakan kecuali dalam hal-hal yang mengandung unsur-unsur yang memberatkan atau menyulitkan. Misalnya kalimat "*ia berusaha keras untuk membawa batu besar*", dan tidaklah tepat kata itu dipakai dalam kalimat "*iaberusaha keras untuk membawa biji-bijian*".⁵

Etimologi diatas memberikan indikasi bahwa si mujtahid harus mempunyai kesanggupan yang tinggi dalam menyelesaikan fenomena keagamaan pada umumnya seperti; seperti fiqih (hukum), teologi, filsafat, tasawuf dan sebagainya bermodalkan kesungguhan (serius) dan memiliki kesabaran untuk mencari dalil-dalil serta mengejawantahkannya dalam persoalan-persoalan yang munculkan, mengingat produk hukum yang akan dilahirkan, memiliki resiko ganda (dunia dan akhirat) dan si mujtahid mampu mempertanggungjawabkannya.

Definisi yang diketengahkan diatas secara umum kelihatan sama pada substansi yaitu, sama-sama berupaya mendapatkan hukum dengan mencurahkan segenap kemampuan. Namun pada sasaran yang akan dicapai terdapat variasi seperti oleh al-Syairazi mencurahkan kemampuan itu dalam penggalian hukum syara'. Berbeda dengan Syairazi, bagi Imam al-Ghazali sasarannya adalah untuk mendapatkan ilmu tentang hukum syara'. Lazimnya dalam kegiatan ilmiah, mestilah memiliki metodologi, logika kebenaran dan sejumlah paradigma yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Sedangkan bagi al-Amidi bahwa obyek ijtihad adalah terbatas pada mengeluarkan hukum syara' yang hasil perolehannya bersifat *zhanni*, sehingga hasilnya relatif, dengan tingkat kebenarannya tidaklah mutlak atau dalam istilah ushul fikih disebut *zhanni*. Bagi Abu Zahrah curah kemampuan itu dalam mengistimbathkan dan penerapan hukum. Artinya Abu Zahrah melihat, baik pada dataran *istinbathi* maupun pada dataran *tathbiqi* merupakan sasaran dari "curah kemampuan". Sementara itu bagi al-Dawalibi, Baidhawi dan al-Syairazi "curah kemampuan" itu dalam hal penggalian hukum syara'iyah..

Definisi di atas terlihat mengakomodir ketiga makna lughawi (sanggup, sungguh dan sulit) yang telah diuraikan diawal karena seorang mujtahid harus memiliki kesanggupan, kesungguhan dan sabar dalam pencarian, pengalihan atau dalam

⁵(Lihat Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasfa Min 'Ilmi al Ushul* Juz. 1; Dar al-Fikr Lithibaati Wa al-Nashr Wa Tausi', t.th, h. 350. Hal yang sama lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* Juz II (t.tp. : Dâr al-Fikr, t. th). h. 1037.

melakukan penelitian untuk menemukan hukum. Disamping itu, pemaknaan kata *jahada* juga mengandung maksud bahwa ijtihad itu menekankan pada; *pertama*, memperoleh dugaan kuat, yang berarti semaksimal apapun usaha ijtihad itu, batas perolehan hukumnya adalah dugaan kuat saja, yang boleh jadi benar atau bahkan salah. *Kedua*, sampai batas merasa tidak mampu melebihi usahanya, yang menegaskan bahwa ijtihad itu haruslah merupakan usaha yang telah mencapai batas maksimal kemampuan seorang mujtahid yang tidak mungkin dilampauinya lagi. Jadi apabila kita konsisten dengan definisi ijtihad diatas maka dapat kita tegaskan bahwa ijtihad sepanjang pengertian istilah hanyalah monopoli dunia hukum.

C. Syarat-syarat dan Macam-macam Ijtihad

1. Syarat-Syarat Ijtihad

Ada beberapa syarat yang mesti diketahui terutama bagi mujtahid dan ilmuan hukum Islam yakni;

a. Menguasai Bahasa Arab

Sejalan dengan kredibilitas mujtahid sebagai orang yang dianggap mampu menggali hukum syara', sudah selayaknya ia mengetahui (menguasai) bahasa Arab.⁶

Penguasaan bahasa Arab, diantara mujtahid memandang cukup dengan kemampuannya mengemukakan beberapa aspek bahasa arab dari kitab pengarang terkenal seperti kitab *Mufradat al-Qur'an* yang ditulis oleh *ar-Raghib al-Ashfihani* dan kitab *al-Nihayat fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar* yang ditulis oleh *Ibn al Atsir*.⁷

Rasyid Ridla berpendapat bahwa bahasa Arab merupakan salah satu syarat berijtihad. Bahkan ia menekankan perlunya seorang mujtahid menguasai bahasa Arab mengenai tata bahasa, susunan kata, termasuk kemampuan lengkap yang berhubungan dengan ilmu kebahasaan. Kemampuan bahasa seperti ini dibutuhkan agar mujtahid dapat menangkap (memahami) makna yang terkandung dalam al-Qur'an maupun Hadits.⁸

Mencermati diskursus kemampuan bahasa yang berkembang pada kalangan keilmuan diatas, adalah sangat logis kemampuan bahasa dijadikan sebagai kriteria yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, mengingat sumber informasi hukum Islam adalah berbahasa Arab. Oleh karenanya kemampuan mujtahid di dalam

⁶ Mayoritas Ulama berpendapat sama tentang perlunya mujtahid menguasai bahasa arab dengan berbagai aspek kajiannya seperti, nahwu, saraf, mutlak *muqayyad*, lafazh 'am dan *khash*, *haqiqidan majazi*, *dilalat lafazh*, *muhkam* dan *mutasyabihat*, *nash* dan *fahm-nya* (arti atau maksudnya). Akan tetapi, kebanyakan mereka tidak mensyaratkan mujtahid menguasai bahasa arab dengan mahir setingkat dengan pakar bahasa arab seperti Ashmu'i dan Sibawahi. (Lihat; Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II (t.tp. : Dâr al-Fikr, t. th). h. 1047).

⁷ Alasan perlunya mujtahid menguasai bahasa arab, menurut para ulama, karena al-Qur'an dan Hadits merupakan kitab syari'ah yang disampaikan dengan bahasa Arab. Bahkan, menurut mereka, beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits sendiri yang menunjukkan bahwa al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Dalam ayat al-Qur'an terdapat 14 ayat yang menjelaskan bahwa al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Keempat belas ayat tersebut masing-masing terdapat dalam surat *Yusuf* ayat 2, surat *ar-Ra'ad* ayat 37, surat *Ibrahim* ayat 14, surat *an-Nahl* ayat 103, surat *Maryam* ayat 97, surat *Thaha* ayat 113, surat *as-Syu'ara* ayat 195, surat *az-Zumar* ayat 18, surat *Fushilat* ayat 3 dan 44, surat *asy-Syura* ayat 7, syarat *az-Zukhruf* ayat 3, surat *ad-Dukhan* ayat 58 dan *al-Ahqaf* ayat 12.

⁸ Muhammad Rasyid Ridla, *Al-Imamat al-Uzhma Mabahits Syar'iyat Ijtima'iyat Ishlahiyyat*, (Mesir: Mathba'at al-Manar, 1341), h. 87.

berbahasa Arab adalah sangat penting, sehingga mujtahid memiliki adekuat dalam melahirkan hukum melalui ijtihad. Mengingat ranah keilmuan secara umum dan khususnya bahasa (*lughah*) pada era modern ini semakin menyempit, maka kemampuan bahasa yang dimiliki oleh mujtahid tidak mestilah menguasai semua ranah bahasa sampai ke aspek-aspek yang paling rinci. Namun kemampuan minimal pada aspek-aspek pokok seperti, ilmu *qawa'id, nahu, sharaf, balaghah* dan lainnya mestilah dikuasai oleh seorang mujtahid.

b. Mengetahui al-Qur'an dan Sunnah

Secara ideal para mujtahid selayaknya dapat menghafal seluruh ayat al-Qur'an tetapi dalam kehidupan yang sudah demikian maju dengan tersedianya sumber-sumber buku, seperti kitab tafsir *ayat al-ahkam* dan kitab-kitab lain yang bertalian dengan masalah *ulum al-Qur'an*, para mujtahid tidak perlu secara mutlak dibebani menghafal seluruh al-Qur'an ketika akan mengalami kesulitan. Sementara persoalan-persoalan baru yang terus bermunculan tidak dapat dipecahkan dengan cepat.

D. Ranah dan kekuatan hukum Ijtihad

Ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid adalah dalam semua ketentuan hukum syar'i (sah secara agama) yang tidak mempunyai dalil qath'i

(كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعى و المجتهد فيه) Disini ketentuan hukum syar'i dibedakan dari ketentuan *aqliyyat* dan masalah kalam (teologi)⁹.

Ketentuan hukum yang dimaksud adalah mengenai masalah-masalah yang tidak mendapat dosa bila ijtihad dilakukan. Sebaliknya, dalam masalah-masalah yang mempunyai dalil *qath'i*, maka ijtihad tidak dapat dilakukan, dan bila salah dalam hal itu mendapat dosa¹⁰

Al-Gazali mengatakan bahwa seorang mujtahid harus mempunyai kemampuan intelektual untuk memahami syara' sehingga ia dapat membangkitkan stimulus *zhan* (opini yang lebih dekat kepada kebenaran) dengan mengamati permasalahan, mendahulukan apa yang harus didahulukan dan mengakhirkan apa yang harus diakhirkan. Ia juga merupakan seorang adil yang menjauhi kemaksiatan agar fatwa atau hasil ijtihadnya dapat diandalkan. Ijtihad atau fatwa orang yang tidak adil tidak dapat diterima. Penguasaan intelektual dan keharusan adil dijelaskan oleh al-Ghazali dalam delapan butir¹¹. Dua butir pertama merupakan pendahuluan; dua butir selanjutnya sebagai pelengkap; dan empat butir terakhir sebagai moderasi¹²

⁹Abû Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'ilmi 'ilmi 'l-Ushul*. Jilid II (Bairut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, reprint dari cetakan Mesir 1324 H), h.354.

¹⁰*Ibid.*, h.356-358.

¹¹Delapan butir yang dimaksud oleh al-Ghazali adalah; 1. Kitab (Qur'an): seorang mujtahid tidak diharuskan untuk mengetahui seluruh kandungannya, tetapi cukup hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan hukum saja... 2. Sunnah: (a) Ia harus mengetahui hadits-hadits yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan hukum, yang jumlahnya beribu-ribu. 3. Ijma (konsensus): Ia harus mengetahui dimana terdapat ijma sehingga dalam berfatwa ia tidak sampai menyalahi ijma.. 4. Akal. 5. Ia mengetahui dalil-dalil dan syarat-syaratnya sehingga mendapatkan keterangan dan dalil-dalil (البراهين و الأدلة) yang dibutuhkan. 6. Ia mengetahui bahasa dan gramatika yang dibutuhkan untuk memahami ucapan orang arab serta kebiasaan mereka dalam menggunakan bahasa.. 7. Ia mengetahui perbedaan antara

Para ulama ushul fiqh berpendapat sama tentang ayat-ayat al-Quran atau hadis Rasulullah saw. yang tidak diragukan lagi kepastian hukumnya (*qath'iy fi al-tsubuth wa qath'i fi al-dilalah*) bukan lagi menjadi ranah ijthad. Maksudnya adalah, ketika al-Quran dan hadis Nabi menginformasikan hukum yang dikandungnya secara tegas dan pasti, maka wilayah itu tidak lagi menjadi ranah ijthad. Misalnya, kewajiban melaksanakan shalat lima waktu, kewajiban berpuasa, zakat, haji, larangan berzina, membunuh dan sebagainya.

Oleh karenanya ranah ijthad itu seperti yang diungkapkan oleh al-Ghazali, bahwa ruang ijthad itu adalah pada hukum *syar'i* yang tidak ditemukan dalil yang *qath'i* disitu¹³, yang oleh Abdul Wahab Khalaf dibagi kepada tiga kategori yakni; *pertama*, hadis ahad yaitu hadis yang tingkat kepastian bahwa hadis dimaksud benar-benar dari Rasul baru sebatas dugaan kuat (*zanni*), karena berpeluang (walaupun sedikit) informasinya bukan dari Rasul. *Kedua*, lafaz-lafaz atau redaksi al-Quran atau Hadis yang informasi hukumnya tidak tegas sehingga dimungkinkan ada makna lain yang lebih kontekstual. Fungsi ijthad disini adalah untuk mengetahui makna yang kontekstualistik, misalnya melalui pendekatan *asbab al-nuzul* dan atau pendekatan *asbab al-wurud*. *Ketiga*, masalah-masalah yang tidak ada teks ayat atau hadis atau ijma' yang menjelaskan hukumnya. Fungsi ijthad disini adalah untuk meneliti dan menemukan hukum melalui *manhaj qias*, *istihsan*, *maslahah al-mursalah*, *'urf*, *istishab*, dan *sadd al-zari'ah*.

Bertolak dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa hukum yang dihasilkan oleh ijthad dengan sendirinya bersifat *zhanni* bukan *qath'i*, karena hasil yang dicapai dari ijthad itu adalah dugaan terkuat dari seseorang (mujtahid) yang boleh jadi belumlah persis sama dengan maksud Syari'. Sebagai implikasi logis kepada mujtahid tersebut, ia wajib mengamalkan dan berfatwa dengan hasil ijthadnya, yang oleh Abu Husein (pengarang "*Kitab al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*"), mujtahid itu tidak boleh mengikuti mujtahid lain ketika ia telah melahirkan hasil ijthadnya dalam suatu masalah¹⁴. Disamping itu hasil ijthad tersebut juga mempunyai kekuatan mengikat bagi orang yang meminta fatwa karena mazhab orang yang meminta fatwa adalah pendapat mujtahid yang memberi fatwa.¹⁵

Hasil ijthad yang diproduksi mujtahid tidaklah mempunyai kekuatan mengikat bagi umat secara umum, (diluar mujtahid dan orang yang meminta fatwa) yang disebut diatas, karena hukum yang dilahirkan itu bersifat *zhanni*. Bahkan hasil ijthad dimaksud dapat saja dikritik oleh mujtahid lainnya, atau oleh si mujathid yang melahirkan itu

nashikh (teks pembatal) dan manshuk (teks yang dibatalkan) dalam kitab dan sunnah. Ia tidak harus menghafal semua ayat dan hadist mengenai ini, tetapi harus mengetahui mana ayat atau hadits yang nasikh atau mansukh. 8. Ia mengetahui perbedaan antara hadits shahih dan bukan shahih, yang diterima dikalangan ummat., (Lihat al- Ghazali, *Ibid.* Juz II, h. 100).

¹²*Ibid.*, h. 350-351, 354.

¹³*Ibid.*, h. 345

¹⁴Abu Husin Muhammad bin Ali bin al-Thaiyib al-Bishri al-Mu'tazili, *Kitab al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, juz. 2 (Damaskus:t.t.) 1965, 932

¹⁵Ibnu al-Subki, *Jam'u al-Jawami'* jilid 2 (Indonesia: Maktabah Dar al-Haya' al-Kutub al-Arabiya), tt. H. 395.

sendiri, seperti yang telah dilakukan oleh Imam al-Syafi'i yang populer disebut dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*.¹⁶

Sikap ekstrim kedua adalah adanya sebagian tokoh yang terlalu melecehkan warisan fiqh klasik. Menurut mereka warisan fiqh klasik merupakan produk ijtihad ulama madzhab abad ke II H yang hanya cocok untuk masa lalu. Untuk zaman modern ini semua pendapat mereka sudah *out of date* (ketinggalan zaman), karena itu perlu dilakukan ijtihad di zaman ini mulai dari nol. Selain itu, pemikiran ulama madzhab tersebut sebenarnya tidak termasuk kepada ajaran agama yang sacral (*ma'shum*), karena merupakan pemikiran manusia yang tidak terlepas dari kesalahan. Oleh sebab itu ijtihad di zaman ini harus merujuk langsung kepada al-Qur'an dan Sunnah saja.

Selanjutnya menurut al-Qardhawi, dalam memilih pendapat terkuat ketika melakukan *ijtihad intiqaiy*, seorang mujtahid kontemporer harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti; perubahan sosial politik pada tingkat nasional dan internasional, perkembangan ilmu pengetahuan modern, serta tuntutan dan kebutuhan zaman.¹⁷

Tawaran al-Qardhawi ini patut untuk dipertimbangkan, karena seorang mujtahid tidak boleh menetapkan hukum dari belakang meja saja tanpa memperhatikan realitas sosial yang terjadi. Dan yang perlu diperhatikan pula bukan siapa yang mengatakannya, tetapi bagaimana dalil dan cara berpikirnya, bagaimana relevansinya dengan zaman sekarang, dan bagaimana pula hubungannya dengan *maqashid al-syari'ah*.

Sebagai contoh, dapat dikemukakan masalah yang berhubungan dengan talak atau perceraian. Menurut mayoritas ulama ahli fiqh termasuk madzhab yang empat, talak dinyatakan jatuh apabila diucapkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri, tanpa harus tergantung pada adanya saksi.¹⁸ Akan tetapi menurut ahli fiqh dari kalangan Syi'ah, talak baru dianggap terjadi kalau disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.¹⁹ Sepertinya untuk masa sekarang pendapat Syi'ah itu dengan segala modifikasinya lebih dapat diterima.

Di Indonesia, berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, talak baru dianggap terjadi kalau dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Ketentuan itu sebenarnya sejalan dengan tujuan disyariatkannya talak dalam Islam. Al-Qur'an baik secara langsung atau tidak, menyatakan bahwa talak merupakan "jalan terakhir" untuk menyelesaikan persoalan suami isteri. Hadits Nabi juga menguatkan pernyataan di atas bahwa talak itu termasuk perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah.

¹⁶Qaul Qadim adalah pendapat Imam al-Syafi'i yang bercorak ra'y, sedangkan qaul jadid adalah pendapatnya yang bercorak hadis, disebabkan temuannya mengenai hadis dan fikih yang diriwayatkan ulama Mesir yang tergolong kepada ahl al-hadis. {Lihat : Sya'ban Muhammad Ismail, al-Tasyri' al-Islami: Mashadiruh wa Athwaruh, (Qahirah: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1985), h. 337-338}.

¹⁷Al-Qardhawi, *al-Ijtihad*, h. 120-125

¹⁸Al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut, Dar al- 'Ulum, 1988) Juz II, h. 227

¹⁹Jawâd Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far al-Shadiq*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1978) Juz V, h. 12

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Islam tidak menginginkan terjadinya perceraian, namun dalam keadaan tertentu hal itu dibenarkan. Sekiranya dalam pelaksanaan talak dipersyaratkan adanya saksi, seperti pendapat ahli fiqh Syi'ah, suami dimungkinkan untuk dapat berpikir dengan baik sebelum menjatuhkan talaknya. Tetapi jika tidak demikian, kemungkinan suami untuk menggunakan haknya, kapan dan dimana pun ia berada akan semakin besar.

Pemikiran al-Qardhawi tentang "*al-Ijtihad al-Intiqaiy*" tersebut terlihat masih kurang jelas batasannya. Maksudnya, bila ada suatu masalah yang akan ditetapkan hukumnya, lalu akan diteliti apakah masalah tersebut, atau yang mirip dengan masalah tersebut sudah pernah dibahas oleh ulama-ulama klasik atau belum? Untuk itu perlu diteliti kitab-kitab fiqh klasik, tetapi sejauh mana batas penelitian terhadap kitab-kitab itu, ini yang masih belum jelas. Karena kitab-kitab fiqh klasik dari berbagai madzhab itu sangat banyak jumlahnya, sampai akhir usia seseorang pun mungkin belum selesai ia mempelajari seluruh kitab tersebut.

Kesulitan ini mungkin dapat diatasi dengan merujuk kepada kitab-kitab perbandingan madzhab atau kitab tafsir ayat-ayat hukum dan hadits-hadits hukum yang menyebut perbedaan pendapat berbagai madzhab. Misalnya kitab "*al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*" karangan al-Qurthubi (w. 671H), "*kitab Nail al-Awthar*" karangan al-Syaukani (w. 1255H), kitab "*Subul al-Salam*" karangan al-Shan'aniy (w. 1182H), dan lainnya. Mungkin pula kesulitan itu dapat diatasi dengan memperhatikan daftar isi kitab-kitab fiqh klasik dan mencari tempat-tempat (topik-topik) yang diperkirakan membicarakan masalah yang sedang dibahas.

Adanya dua pendapat yang berbeda menunjukkan bahwa masalah itu merupakan masalah *ijtihadiyah* yang *interpretable (zhanniy)*. Produk ulama masa lalu masih boleh dijadikan objek ijtihad oleh ulama yang datang kemudian. Apakah pendapat ketiga itu sesuai dengan kedua pendapat terdahulu, atau bertentangan, hal ini tidak menjadi masalah. Karena tidak ada keharusan bahwa hasil ijtihad yang muncul kemudian tidak boleh bertentangan dengan hasil ijtihad ulama-ulama terdahulu. Produk ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh produk ijtihad yang lain, masing-masing berlaku sesuai dengan masanya²⁰ (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد). Dengan kata lain bahwa perubahan di dalam suatu masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Sementara itu mujtahid dimasanya berupaya keras mencurahkan kemampuannya untuk menyelesaikan kasus hukum yang muncul dimasanya itu, sehingga ia dengan usaha keras itu memiliki *zhan* yang tinggi tentang putusan hukum yang dilahirkannya itu yang boleh jadi berbeda dengan hasil ijtihad ulama lainnya. Hasil *zhan* yang tinggi yang dilahirkan oleh mujtahid belakangan tidaklah memiliki kekuatan untuk membatalkan hasil ijtihad ulama sebelum dan selain dia.

E. Penutup

²⁰ *Ibid.*

Ijtihad dapat dikatakan sebagai mesin penggerak dinamika hukum Islam dalam menyelesaikan fenomena hukum yang muncul sepanjang sejarah kehidupan manusia di bumi ini. Kegiatan ijtihad dapat dilakukan secara kolektif (ijtihad *jamma'y*) dan personal (ijtihad *fardy*) dengan pendekatan bayani maupun *ra'yi*.²¹ Ijtihad merupakan sarana yang paling efektif untuk mendukung tetap tegak dan eksisnya hukum Islam serta menjadikannya sebagai tatanan hidup yang *up to date* yang sanggup menjawab tantangan zaman (*shalihun li kulli zaman wa makan*).

Melakukan ijtihad bagi seorang mujtahid merupakan kewajiban yang dapat melahirkan produk hukum *taklifiyyah* dan *wadh'iyyah* pada ranah *zanni*. Ijtihad baru akan berfungsi dan berdayaguna jika ijtihad dilakukan oleh para ahlinya (mereka yang memenuhi persyaratan dan dilakukan pada tempatnya sesuai dengan ketentuan yang telah diakui kebenaran dan kesalahannya). Mujtahid disyaratkan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah dalam berbagai aspeknya, tarekh tasyri', memahami masalah yang sudah disepakati ulama, memahami bahasa Arab, dan mengetahui ushul fiqh dan lainnya. Ijtihad akan membawa keselamatan kejayaan bagi Islam dan umatnya, apabila hal itu dilakukan oleh yang memenuhi persyaratan dan dilakukan pada ranah diluar *nash* yang *qath,i*.

Mujtahid secara sederhana dapat dibedakan pada mujtahid mutlaq dan mujtahid muntasib. Namun didalam perkembangannya dapat diturunkan kepada berbagai level seperti; mujtahid muthlaq ghairu mustaqil, mujtahid filmazhab, mujtahid tarjih dan mujtahid fatwa.

Fatwa adalah pendapat hukum yang diberikan oleh seorang ulama (*faqih*) kepada seseorang atau masyarakat yang mengajukan pertanyaan menyangkut hukum kasus yang sedang dialaminya tanpa mengikat. Fatwa sering sekali dipadankan dengan terma fiqhi, dan hukum Islam. Fikih dan Fatwa memang sama-sama produk yang dilahirkan melalui instrumen (mesin) ijtihad, namun fatwa memiliki substansi yang tidak dimiliki fiqhi, dan hukum. Satu hal yang menjadi karakter fatwa adalah bahwa ia bersifat kasuistik sementara yang lain adalah normatif.

Konsekwensinya, seorang ulama ketika ingin mengeluarkan fatwa ia harus mamahami betul jenis kasus yang diajukan oleh *mustafti* (orang yang mengajukan pertanyaan kepada ulama tentang hukum masalah yang dialaminya), bahkan bukan hanya jenis kasusnya tapi karakteristik-karakteristik yang melingkupi terjadinya kasus itu, termasuk siapa pelaku kasus, kapan terjadi kasus, dan dimana ia lakukan, dalam kondisi apa ia lakukan, apa motivasinya dan apa implikasi fatwa tersebut.

Historical, seiring dengan perkembangan ijtihad dan fikih, fatwapun telah tumbuh dan berkembang sejak era sahabat, tabi'in, tabi' al-tabi'in bahkan sampai saat ini. Ketika spektrum ijtihad melebar yang dipengaruhi oleh jarak waktu dan wilayah, (kapan dan dimana sumber hukum itu pertama dilahirkan), maka spektrum fatwapun semakin melebar seperti melebarnya spektrum cahaya yang terpancar dari titik sumber cahaya. Seiring dengan pelebaran dan pengembangan tersebut, muftipun meningkat secara siqnifiqan, paling tidak 130 mufti di masa sahabat menjadi 500 orang lebih pada abad IV H, yang menyebar

²¹ Ijtihad bayani adalah penggalian hukum Islam dengan menganalisis lafadz-lafadz yang digunakan sebagai dalil, melalui pendekatan bahasa. Ijtihad al-Ra'yi dilakukan dengan menggunakan akal fikiran, baik dengan mengqiyaskan, istihsan, istishab, masalahah maupun yang lainnya.

keberbagai wilayah antara lain; Madinah, Mekkah, Bashrah, Kuffah. Syam, Mesir, Qairawan, Andalus, Yaman dan Bagdad.

Kondisi yang demikian ternyata secara empiris belumlah mampu untuk membendung taqlid di tengah-tengah masyarakat dunia Islam yang terjadi terutama setelah abad 5 sampai abad ke abad ke 13 hijriyah. Sehingga persoalan taqlid pun menjadi diskursus di dalam khazanah keilmuan hukum Islam. Sehingga melahirkan kritik-kritik pedas terhadap persoalan taqlid. Karena tokoh yang diharapkan mampu menjawab masalah secara cerdas tidak tampil sebagai mufti seperti era keemasan.

Sejak era modern ilmuwan Islam termasuk ilmu hukum Islam, mencoba menghidupkan kembali mesin ijtihad yang sudah berabad-abad mati karena tidak ada yang mau menghidupkannya. Paling tidak, hal itulah yang melahirkan terma ijtihad dan fatwa kontemporer. Sehingga ilmuwan hukum mulai bekerja keras kembali dengan menghidupkan mesin ijtihad yang sudah tidak hidup sebelumnya.

Yusuf al-Qaradhawi dari Mesir adalah salah satu sampel yang melahirkan metode ijtihad yang disebutnya dengan ijtihad *intiqā'i* (ijtihad komparatif selektif), dan *intisya'i* (ijtihad konstruktif inovatif). Dengan metode ijtihad yang diterapkannya, yakni berupa ijtihad *intiqā'i* (tarjih), ijtihad *insya'i* (kreasi) dan perpaduan antara keduanya, Qardhawi mampu menemukan hukum yang tepat, sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan tujuan syari'at. Ijtihad *tarjih* yang dilakukan oleh Qardhawibukan hanya menyeleksi pendapat madzhab yang beraliran sunni, melainkan juga menyeleksi pendapat-pendapat yang beraliran bukan sunni, atau bersifat lintas madzhab.

Dengan demikian Ijtihad dapat dijadikan alat untuk menjawab masalah-masalah yang semakin komplis dari waktu ke waktu baik dalam bentuk reaktualisasi, ataupun aktualisasi hukum Islam. Untuk menggalakkan ijtihad guna menjadikan hukum Islam ini dinamis dan *lincah* perlu digalakkan studi fiqh perbandingan dan ushul fiqh perbandingan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya perguruan tinggi.

Sesungguhnya *Ijtihad* merupakan kunci untuk menyelesaikan problema yang dihadapi oleh umat Islam sekarang dan yang akan datang. Ijtihad merupakan sumber ketiga ajaran Islam setelah Al-Qur'an dan Hadis inilah yang membuat Islam sesuai dengan tempat dan zaman (*shalihun likulli zaman wa makan*). Hal inilah yang dibuktikan oleh para Ulama dari berbagai bidang keilmuan pada zaman keemasan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amidi, Saif al-Din Abi al-Hasan 'Ali ibn 'Ali ibn Muhammad al-, *Al-Ihkam fî Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Arief, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syalthut*, Yogyakarta: LESFI, , cet. Ke-1, 2003.
- Ashfihani, al-Raghib al-, *Al-Mufradat fî Gharib al-Qur'an* Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.th.
- Asqar, Umar Sulaiman al-, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Amman, Dar al-Nafa'is; 1991.
- Ayyubi, Muhammad Hisyam al-, *al-Ijtihad wa Muqtadhiyat al-'Ashr*, Amman: Dâr al-Fikr, t.th.
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- , *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Sainifik-Modern*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Baidhawi, al-, *Minhaj al-Wushul*, (t.t.),
- Basyir, Ahmad Azhar, "Pokok-Pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), t.t.
- Bukhari, Muhammad ibn Isma'il Abu Abdillah Al-, *al-Jami al-Shahih, Bab Ajr al-Hâkim idza Ijtahada Faashaba au Akhtha'a*, t.tp., tp., t.th, juz 9.
- , *Matan al-Bukharî bikhasiyat al-Sanad*, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, j. 2, 1414 H/1995 M.
- Darain, Fath al-, *al-Manahij al-Ushuliyyat fî al-ijtihād bi ar-Ra'y fî at-Tasyrî'*. Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975.
- Dawalibi, Muhammad Ma'ruf al-, *Al-Madkhal ila 'Ilmi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, , cet. Ke-3, 1999.
- , *Ijtihad Muhammadiyah Dalam Masalah-Masalah Kontemporer*, Jakarta, PPS, 1994.
- Esposito, John L., "Fatwa", *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, , Vol. II, 1990.
- Fasi, Muhammad bin al-Hasan al-Hujwi al-Tsa'alabi al-, *Al-Fikr al-Sami fî Tarîkh al-Fiqh al-Islami* Madinah al-Munawarah:1977 Jil. I. h..230-231}
- Fazlurrahman, *Islam*, London: The University of Chicago, 1979.
- Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al- *al-Mustasfa Min 'Ilmi al Ushul* Juz. 1; Dar al-Fikr Lithibaati Wa al-Nashr Wa Tausi', t.th.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang; 1987.
- Ghuddah, Abd al-Fattah Abu, *Al-Isnad min ad-Dîn wa Shafhat wa Musyriqat min Tarikh Sima al-Hadits 'Inda al-Muhadditsin* Damsyiq: Dar al-Qalam, 1412 H/1992.
- Hajj, Ibnu Amir al-, *At-Taqrir wa at-Tadir fî 'ilm al-Ushul* Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996 M.
- Hallaq, Wael B., *The Primacy of The Quran in Syatibi Legal Theory*, dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (ed) *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams* Leiden: EJ-Brill, 1991.
- Hasaballah, Ali, *Ushul at-Tasyrî' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1391 H /1971 M.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim al-, (Syams al-Din Abi 'Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr), *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, , juz III, 1996
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Maktabah al Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1956.

- Madkur, Muhammad Salam, *al-Ijtihad fî al-Tasyri' al-Islami*, t.tp.: Dar al-Nahdhoh al-'Arabiyyah, , cet. Ke-1, 1984.
- , *Manahij al-Ijtihad fî al-Islam* Kuwait, Jami'ah al-Kuwait: 1974.
- Mahmashani, Subhi, *Falsafat al-Tasyri fî al-Islam*, Beirut; Dar al-Ilmu al-Malayin; 1961.
- Manzhur, Ibnu, *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dar Shadir, , Juz III, t.th.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad: Islamic Research Institut, 1977.
- Mudzhar, H.M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhammad al-Ma'jub, *'Ulama wa Mutafakkirun 'Araftuhum*, Beirut: Dar al-Nafais, 1997.
- Mughniyah, Jawad, *Fiqh al-Imâm Ja'far al-Shadiq*, Beirut, Dar al-Fikr, 1978. Mu'tazili, Abu Husin Muhammad bin Ali bin al-Thaiyib al-Bishri al-, *Kitab al-Mu'tamad fî Ushul al-Fiqh*, juz. 2, Damaskus: t.p., 1965
- Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-i, *Shahîh Muslim*, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, jld. 1, 1414 H/1993 M.,
- Nasution, Harun, "Dasar Pembaharuan dalam Islam", dalam M. Yunan Yusuf, dkk., (ed.), *Cita dan Citra Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Nawawi, Imam Abi Zakariya Muhyi al-Din Syaraf al-, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th. juz I. Nuruddin, Amiur, *Ijtihad Umar ibn al-Khaththab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Qardawy, Yusuf al-, *al-Fatwa Bayn al-Indibath wa al-Tasayyub*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- , *Madkhal Li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1991.
- , *Al-Ijtihad fî al-Syari'ah al-Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliyah fî al-Ijtihad al-Mu'ashir*, Kuwait, Dar al-Qalam 1985.
- , *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.
- Qayyim, Ibnu al-Jauziyyat, *I'lâm al-Muwaqqi'în*, pada Maktabah Syamilah.
- Ridla, Muhammad Rasyid, *Al-Imamat al-Uzhma Mabahits Syar'iyyat Ijtima'iyyat Ishlahiyyat*, Mesir: Mathba'at al-Manar, 1341.
- , *Yusr al-Islam wa Ushul at-Tasyri' al-'Am*, Mesir: Mathba'at Nahdlat, 1375 H-1956 M.
- Razaq, Ali Abd, *al-Ijmâ' fî as-Syarî'at al-Islâmiyyat* Mesir: Dar- al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- Sabiq, al-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut, Dar al-'Ulum, 1988.
- Sarakhsi, Al-, *Ushul al-Sarakhsi*, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1372 H.
- Shiddieqy, Hasbi Al-, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al, *Sunan Abi Dawud, Bab ma Yudkaru fî Qarni al-Mi'ah*, Tahqiq: Muhammad 'Abd al-'Aziz al-Khalidi, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, juz 3. cet. ke-1, 1996
- Sjadzali Munawir, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Subki, Ibnu al- *Jam'u al-Jawami'* jilid 2 Indonesia: Maktabah Dar al-Haya' al-Kutub al-Arabiya, tt.
- Suma, Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

- Syairazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf al-, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, cet. Ke-2, 2003
- Syafi'i, Muhammad bin Idris al-, *al-Risalat*, Maktabat Dâr ats- Tsaqafat: t.p., t.th.
- Syathibi, Al-, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*, Cairo: Mushthafa Muhammad, t.t.
- Sya'ban, Muhammad Ismail, al-Tasyri' al-Islami: Mashadiruh wa Athwaruh, Qahirah: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1985.
- Syariruddin, Amir, *Ushûl Fiqh*, Jakarta; Logos Wacana Ilmu, , Jild.2, 2001.
- Syaukani, Muhammad Ibn 'Ali al-, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dâr al-Fikr, tth.
- Wahidi, Al-, *Asbab an-Nuzul*, al-Qahirat: t.p., 1968
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zarqani, Muhammad Abd al-Azhim al-, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, al-Qahirat: Isa al-Babi al-Halabi, t.th.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

SOSOK DAN RANAH IJTIHAD

Oleh; Aditiawarman Adnan

Dosen UIN Imam Binjol Padang

F. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang paripurna diyakini oleh pemeluknya sebagai agama *rahmatan li al-'alamin*. Untuk memahami Islam, Allah telah memberikan pedoman berupa al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber utama dari ajaran Islam. Al-Qur'an yang jumlahnya lebih dari enam ribu ayat tidak diterima oleh Nabi Muhammad saw. dalam bentuk satu buku, melainkan himpunan wahyu-wahyu Allah yang diterima dalam jangka waktu hampir dua puluh tiga tahun. Al-Qur'an juga diturunkan bukan dalam suasana kosong budaya, melainkan untuk sekelompok masyarakat pada zaman tertentu, dengan sejarah dan latar belakang kebudayaan tertentu, dan jugalokasi tertentu. Wahyu-wahyu tersebut diterima oleh Nabi Muhammad saw. di tengah masyarakat Arab, di Jazirah Arabia, dan pada tingkat kemajuan dan latar belakang budaya setempat pada abad ketujuh masehi.

Tujuan utama disyariatkan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia dan sekaligus menghindari kemafsadatan. Segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an atau Sunnah maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut.

Wahyu-wahyu Allah khususnya yang mengenai kemasyarakatan, biasanya diterima oleh Nabi sebagai tanggapan atau petunjuk dalam menghadapi masalah atau situasi yang

timbul pada waktu itu. Konsepsi atau formula yang diberikan wahyu tersebut tentunya sangat relevan dengan situasi sosial budaya serta tingkat kemajuan peradaban dan intelektual masyarakat pada waktu itu. Seiring perkembangan dan perubahan zaman, maka ijtihad sebagai upaya untuk mengaktualisasikan ajaran Islam dalam upaya menghadapi dinamika kehidupan kemanusiaan, sangat dibutuhkan.

Masyarakat sebagai sebuah komunitas akan senantiasa mengalami perubahan, bersifat dinamis, dan tidak berkarakter statis. Perubahan masyarakat itu dapat terjadikapan dan di mana pun manusia itu berada. Setiap bentuk perubahan, cepat atau lambat, selalu menuntut perubahan dan pembaharuan dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya bidang hukum yang merupakan salah satu institusi penting bagi kehidupan umat manusia. Jangankan perubahan antara masa sekarang dengan masa lebih dari seribu tahun lalu, masa hidup imam al-Syafi'i saja memerlukan dua pendapat berbeda yang disebut dengan *qaul qadîm* (pendapat imâm al-Syafi'i ketika di Iraq, sebelum pindah ke Mesir) dan *qaul jadid* (pendapat imam al-Syafi'i ketika telah pindah ke Mesir).²²

Menurut para ahli linguistik dan semantik, bahasa akan mengalami perubahan setiap sembilan puluh tahun. Perubahan dalam bahasa secara langsung atau tidak langsung mengandung arti perubahan dalam masyarakat itu.²³ Pernyataan tersebut menarik untuk diperhatikan, sebab Nabi Muhammad saw. pernah mengatakan, bahwa setiap seratus tahun (seabad) akan ada orang yang bertugas memperbaharui pemahaman keagamaan.

Setelah Rasulullah wafat, keperluan kepada ijtihad semakin meningkat. Kalaupun masa Rasulullah di samping ada ijtihad, berbagai persoalan masih dapat dikembalikan dan dikonsultasikan kepada beliau, yang kemudian akan beliau jawab dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau, atau dengan ketetapan beliau sendiri sebagai Rasul yang mempunyai otoritas dalam menentukan hukum. Tetapi setelah wafatnya Rasulullah keadaannya menjadi lain, tanggung jawab sepenuhnya untuk memecahkan segala persoalan jelas terpicul kepada umat yang ditinggalkannya.

Kedudukan Nabi Muhammad Saw. sebagai Nabi terakhir nampaknya dipahami oleh umat Islam secara kreatif. Untuk itulah, mereka dengan segala upaya dan kesungguhan, berijtihad, mencari pemecahan masalah, dengan selalu mengambil inspirasi dan menangkap pesan-pesan universal dari al-Qur'an dan Sunnah. Dalam ijtihad kadangkala terlihat, umat membawa pemecahan yang berbeda, bukan saja di kalangan mereka, bahkan juga dengan praktek-praktek yang telah berlaku di masa Rasulullah.

Hal ini setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor perkembangan masyarakat akibat makin meluasnya wilayah Islam, makin banyaknya bangsa-bangsa non Arab yang memeluk agama Islam, serta makin banyaknya sahabat Nabi yang menetap di

²²A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 32

²³Harun Nasution, "Dasar Pembaharuan dalam Islam", dalam M. Yunan Yusuf, dkk., (ed.), *Cita dan Citra Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 19

daerah-daerah baru yang jauh dari hijaz daerah asalnya, dan munculnya madzhab-madzhab.²⁴

Pada masa awal Islam setelah meninggalnya Rasulullah saw., ijtihad telah dilakukan dengan baik dan kreatif. Hal ini misalnya dilakukan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab ketika menjabat sebagai khalifah kedua (13 H/634 M – 23 H/644 M). Pertimbangan-pertimbangan sosial, politik, ekonomi serta keadilan untuk senantiasa mewujudkan kemashlahatan (*al-mashlahah*) umat telah mempertegas sikap Umar dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam. Atas dasar pemahaman itulah, dalam beberapa kasus terlihat Umar mengadakan perubahan hukum dan melakukan penyesuaian agar hukum itu menjadi aktual. Di antara tindakan Umar itu ialah: tidak melaksanakan hukuman potong tangan terhadap kejahatan pencurian; menghentikan hak muallaf dalam menerima pembagian zakat dan subsidi lainnya, menetapkan dan melaksanakan hukuman dera minuman keras sebanyak 80 kali, serta tidak membagi-bagikan tanah taklukan kepada tentara-tentara muslimin.²⁵

Pada masa berikutnya muncul sederetan mujtahid kenamaan sampai era keemasan, kemudian dikenal dengan *al-a'immah al-arba'ah* (empat serangkai imam madzhab) yaitu: Imam Abu Hanifah ibn Nu'man (80H / 699M - 150H / 772M), Imam Malik ibn Anas (93H / 712M - 179H / 798M), Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (150H / 766M - 204H / 820M), dan Imam Ahmad ibn Hanbal (164H / 780M - 241H / 855M). Mereka telah melahirkan pemikiran dan karya yang sangat berharga bagi umat Islam berikutnya seperti, Ilmu fiqh dan ushul fiqh.

Setelah diselingi masa *taqliddan jumud*²⁶ yang juga sering disebut periode tertutupnya pintu ijtihad yang berlangsung dari pertengahan abad ke IV Hijriah sampai akhir abad ke XIII Hijriah,²⁷ kemudian bermunculan pula para pembaharu (mujaddid) yang memotifasi dan menggerakkan pembaharuan, seperti di antara mereka adalah Syekh Muhammad 'Abduh (1849 - 1905 M) dan al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (1865 - 1935 M).

Karena kebudayaan Islam terus berkembang dari waktu ke waktu dengan segala probematika dan masalahnya sesuai dengan perkembangan pikiran manusia, sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan baru

²⁴Ahmad Azhar Basyir, "Pokok-Pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.) *Op. Cit.*, h. 47

²⁵H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 39, Lihat juga Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar ibn al-Khaththab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 136

²⁶*Taqlid* merupakan suatu istilah yang asalnya dipakai untuk menunjuk pada jenis rujukan kepada sahabat-sahabat Nabi [yakni taqlid kepada sahabat Nabi] yang telah menjadi tradisi dalam madzhab hukum klasik, [namun] sekarang berarti penerimaan yang tanpa ada pertanyaan terhadap doktrin-doktrin dari madzhab-madzhab dan tokoh yang ada. Era taqlid dengan batasan kemandegan berpikir secara total sebenarnya tidak pernah terjadi. Pemikiran dan perkembangannya yang dilakukan oleh para ulama selalu berjalan. Bahkan hasil kajian sejarah menunjukkan bahwa aktivitas para ulama berikutnya, setelah anggapan tertutupnya pintu ijtihad, justru tidak kurang kreatif ketimbang aktivitas para ulama pendahulunya. Lihat A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 42-43

²⁷Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang; 1987), h. 206

dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini adalah suatu fenomena yang akan terus terjadi yang tidak bisa dihindari oleh kaum muslimin.

Kalaupun jawabannya tidak didapatkan di dalam nash, maka untuk memecahkan persoalan itu, haruslah para ulama mencurahkan segala daya dan upayanya untuk menetapkan hukum-hukum yang muncul seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman. Penyelesaiannya tentulah dengan metode-metode sistematis dan adekuat, dengan memegang teguh al-qur'an dan hadits sebagai referensi utama kaum muslimin, dan kearah inilah geraknya mesin ijtihad.

Persoalan yang muncul setelah memperhatikan uraian diatas adalah;

- f. Seperti apa sosok (profil) ijtihad tersebut ?
- g. Apakah ijtihad dapat dilakukan oleh siapa saja?
- h. Apakah semua persoalan hukum dapat dijawab dengan ijtihad?
- i. Seperti apakah sejarah dan perkembangan Ijtihad?
- j. Sperti apa kaitan ijtihad dengan Taqlid?

Mengingat begitu pentingnya ijtihad, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, karena pesan al-Quran tidak semuanya berbentuk operasional yang dapat diterapkan dari waktu ke waktu maka paper ini mencoba melihat lebih jauh, sosok ijtihad tersebut, seperti; pengertian, syarat-syarat berijtihad dan mujtahid, ranah ijtihad, sejarah perkembangan ijtihad, kaitan ijtihad dengan fatwa, taqlid dan bentuk-bentuk penerapan ijtihad di era kontemporer, dengan topik; "Paradigma Ijtihad dan Perkembangannya".

G. Pengertian Ijtihad

Ada dua pendekatan yang dilakukan dalam menjelaskan pengertian ijtihad, yaitu, pendekatan etimologi (*lughawi*) dan pendekatan terminologi atau definisi (*ta'rif*) yakni;

1. Etimologi

Kata "*ijtihad*", berasal dari kata Arab "*ja ha da*" (جهد) (*al-jahd* dan *aljuhd*) (الجهـد والجهـد) yang berarti kesanggupan, kesungguhan dan kesulitan (المشقة). Kata "*al-ijtihad*" dan "*al-Tajahhud*" berarti mengerahkan segenapkemampuan, kesungguhan (بذل والمجهود الوسع)²⁸

Al-Ghazali juga menjelaskan secara etimologis, *ijtihad* berakar pada kata : "*ja ha da*" yang berarti: kesulitan atau "kesusahan" Kata ijtihad berasal dari kata "*al-juhdu*" (dengan *dhammah* atau *fathah* huruf jim berarti kemauan dan kesulitan "*masyaqqah*". Kata ini sepola dengan *nafah*, misalnya ungkapan "*wajtahid fil amri*" yang berarti mencurahkan kemampuan dan daya mencapai sesuatu guna mencapai apa yang diinginkan yang berupa tujuan akhir. Kata "*al-Juhdu*" tersebut tidak dapat digunakan kecuali dalam hal-hal yang mengandung unsur-unsur yang memberatkan atau menyulitkan. Misalnya kalimat "*ia berusaha keras untuk membawa batu besar*", dan

²⁸Ibnu Manzhur, *Lisan al- 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.th), Juz III, h. 133, 135

tidaklah tepat kata itu dipakai dalam kalimat "*iaberusaha keras untuk membawa biji-bijian*".²⁹

Etimologi diatas memberikan indikasi bahwa si mujtahid harus mempunyai kesanggupan yang tinggi dalam menyelesaikan fenomena keagamaan pada umumnya seperti; seperti fiqih (hukum), teologi, filsafat, tasawuf dan sebagainya bermodalkan kesungguhan (serius) dan memiliki kesabaran untuk mencari dalil-dalil serta mengejawantahkannya dalam persoalan-persoalan yang munculkan, mengingat produk hukum yang akan dilahirkan, memiliki resiko ganda (dunia dan akhirat) dan si mujtahid mampu mempertanggungjawabkannya.

2. Terminologi

Banyak definisi yang patut diketengahkan dalam menjelaskan arti ijtihad secara terminologi (*ta'rif*). Diantaranya adalah;

- a. Abi Ishaq Ibrahim al- Syairazi (w. 476 H)³⁰ menjelaskan bahwa;
الاجتهاد في عرف الفقهاء استقر اغالوسعوبذلالمجهود في طلب الحكم الشرعي.

"*Ijtihad versi ahli fikih adalah mengerahkan kemampuan mujtahid dalam mencari hukum-hukum syara'.*"

Definisi yang diketengahkan oleh al-Syairazi di atas lebih bersifat umum, dan ditekankan pada adanya upaya yang maksimal bagi seorang mujtahid untuk mengetahui hukum-hukum syara'.

- b. Menurut Imam Al-Ghazali (445H/1058M-505H/1111M); Ijtihad adalah pengerahan segala kemampuannya oleh seorang mujtahid dalam mendapatkan ilmu tentang hukum syara'.³¹ Selanjutnya al-Gazali menjelaskan bahwa ijtihad berarti; الجهود و استقراغ بذل الوسع في فعل من الأفعال (melakukan usaha keras dan memaksimalkan upaya dalam salah satu perbuatan), dan disamping itu ijtihad juga dimaksudkan sebagai (بذل المجتهد (وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة usaha keras yang dilakukan mujtahid dalam mencari ketentuan-ketentuan hukum syari'at. Lebih jauh menurut al-Gazali usaha ada yang bersifat penuh dan bersifat tidak penuh. Ijtihad penuh (*ijtihad tam*) ialah, "usaha keras yang dilakukan dalam mencari sehingga yang bersangkutan merasa dirinya tidak mampu lagi mencari lebih dari itu"³²
- c. Al-Amidi (w. 631 H) menyatakan bahwa dalam terminologi ahli ushul fikih kata ijtihad digunakan khusus dalam arti mencurahkan segenap kemampuan

²⁹(Lihat Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasfa Min 'Ilmi al Ushul* Juz. 1; Dar al-Fikr Lithibaati Wa al-Nashr Wa Tausi', t.th, h. 350. Hal yang sama lihat Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami* Juz II (t.tp. : Dâr al-Fikr, t. th). h. 1037.

³⁰Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Alî ibn Yusuf al-Syairazî, *al-Luma' fî Ushul al-Fiqh*, (Beirût: Dâral-Kutub al Ilmiyyah, 2003), cet. Ke-2, h. 129

³¹Al-Ghazali, *op.cit.*

³²Al-Ghazâlî, *Ibid.*

dalam mencari hukum syar'i yang bersifat *zhanni*, sampai batas dirinya merasa tidak mampu lagi melebihi usahanya tersebut."³³

- d. Imam al-Baidhawi (w.774H/1373M), menjelaskan bahwa ijtihad itu adalah mengarahkan segala kemampuan dalam menggali hukum-hukum syari'at³⁴. Kata, *الجهود و استقراغ بذل الوسع في فعل من الأفعال* berarti mencurahkan kemampuan dan daya sampai batas dimana orang mencurahkan kemampuannya tersebut merasa tak mampu lagi berbuat lebih dari itu. Dengan demikian maka orang yang tak sepenuhnya mengarahkan kemampuannya dalam *berijtihad* dengan sendirinya tidak termasuk ijtihad.
- e. Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi (guru besar ushul fiqh Universitas Damascus), penulis kitab *Al-Madkhal ila 'Ilmi Ushul al-Fiqh*, menukilkan bahwa Ijtihad dapat diartikan sebagai perbuatan mencurahkan segala kemampuan yang dilakukan oleh seorang fuqaha dalam menggali hukum syar'iyah.³⁵
- f. Menurut Abu Zahrah (w.1394H/1974M; ahli hukum Islam dari Universitas al-Azhar Mesir), Ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik dalam meng-*istinbath*-kan hukum syara' maupun dalam penerapannya³⁶.

Definisi yang diketengahkan diatas secara umum kelihatan sama pada substansi yaitu, sama-sama berupaya mendapatkan hukum dengan mencurahkan segenap kemampuan. Namun pada sasaran yang akan dicapai terdapat variasi seperti oleh al-Syairazi mencurahkan kemampuan itu dalam penggalian hukum syara'. Berbeda dengan Syairazi, bagi Imam al-Ghazali sasarannya adalah untuk mendapatkan ilmu tentang hukum syara'. Lazimnya dalam kegiatan ilmiah, mestilah memiliki metodologi, logika kebenaran dan sejumlah paradigma yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Sedangkan bagi al-Amidi bahwa obyek ijtihad adalah terbatas pada mengeluarkan hukum syara' yang hasil perolehannya bersifat *zhanni*, sehingga hasilnya relatif, dengan tingkat kebenarannya tidaklah mutlak atau dalam istilah ushul fikih disebut *zhanni*. Bagi Abu Zahrah curah kemampuan itu dalam mengistimbathkan dan penerapan hukum. Artinya Abu Zahrah melihat, baik pada dataran *istinbathi* maupun pada dataran *tathbiqi* merupakan sasaran dari "curah kemampuan". Sementara itu bagi al-Dawalibi, Baidhawi dan al-Syairazi "curah kemampuan" itu dalam hal penggalian hukum syar'iyah..

Definisi di atas terlihat mengakomodir ketiga makna lughawi (sanggup, sungguh dan sulit) yang telah diuraikan diawal karena seorang mujtahid harus memiliki kesanggupan, kesungguhan dan sabar dalam pencarian, pengalihan atau dalam melakukan penelitian untuk menemukan hukum. Disamping itu, pemaknaan kata *jahad* juga mengandung maksud bahwa ijtihad itu menekankan pada; *pertama*,

³³Saif al-Din Abi al-Hasan 'Ali ibn 'Ali ibn Muhammad Al-Amidî, *al-Ihkam fî Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), juz IV, h. 218

³⁴Al-Baidhawi, *Minhaj al-Wushul*, (t.t.), h. 27.

³⁵ Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *Al-Madkhal ila 'Ilmi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), hal. 52.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hal. 379.

memperoleh dugaan kuat, yang berarti semaksimal apapun usaha ijtihad itu, batas perolehan hukumnya adalah dugaan kuat saja, yang boleh jadi benar atau bahkan salah. *Kedua*, sampai batas merasa tidak mampu melebihi usahanya, yang menegaskan bahwa ijtihad itu haruslah merupakan usaha yang telah mencapai batas maksimal kemampuan seorang mujtahid yang tidak mungkin dilampauinya lagi. Jadi apabila kita konsisten dengan definisi ijtihad diatas maka dapat kita tegaskan bahwa ijtihad sepanjang pengertian istilah hanyalah monopoli dunia hukum.

H. Syarat-syarat dan Macam-macam Ijtihad

2. Syarat-Syarat Ijtihad

Ada beberapa syarat yang mesti diketahui terutama bagi mujtahid dan ilmuwan hukum Islam yakni;

c. Menguasai Bahasa Arab

Sejalan dengan kredibilitas mujtahid sebagai orang yang dianggap mampumenggal hukum syara', sudah selayaknya ia mengetahui (menguasai) bahasa Arab.³⁷

Penguasaan bahasa Arab, diantara mujtahid memandang cukup dengan kemampuannya mengemukakan beberapa aspek bahasa arab dari kitab pengarang terkenal seperti kitab *Mufradat al-Qur'an* yang ditulis oleh *ar-Raghib al-Ashfihani* dan kitab *al-Nihayat fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar* yang ditulis oleh *Ibn al Atsir*.³⁸

Rasyid Ridla berpendapat bahwa bahasa Arab merupakan salah satu syarat berijtihad. Bahkan ia menekankan perlunya seorang mujtahid menguasai bahasa Arab mengenai tata bahasa, susunan kata, termasuk kemampuan lengkap yang berhubungan dengan ilmu kebahasaan. Kemampuan bahasa seperti ini dibutuhkan agar mujtahid dapat menangkap (memahami) makna yang terkandung dalam al-Qur'an maupun Hadits.³⁹

Mencermati diskursus kemampuan bahasa yang berkembang pada kalangan keilmuan diatas, adalah sangat logis kemapuan bahasa dijadikan sebagai kriteria yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, mengingat sumber informasi hukum Islam adalah berbahasa Arab. Oleh karenanya kemampuan mujtahid di dalam berbahasa Arab adalah sangat penting, sehingga mujtahid memiliki adekuat dalam melahirkan hukum melalui ijtihad. Mengingat ranah keilmuan secara umum dan

³⁷ Mayoritas Ulama berpendapat sama tentang perlunya mujtahid menguasai bahasa arab dengan berbagai aspek kajiannya seperti, nahwu, saraf, mutlak *muqayyad*, lafazh 'am dan *khash*, *haqiqidan majazi*, *dilalat lafazh*, *muhkam* dan *mutasyabihat*, *nash* dan *fahm-nya* (arti atau maksudnya). Akan tetapi, kebanyakan mereka tidak mensyaratkan mujtahid menguasai bahasa arab dengan mahir setingkat dengan pakar bahasa arab seperti Ashmu'i dan Sibawahi. (Lihat; Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II* (t.tp. : Dâr al-Fikr, t. th). h. 1047).

³⁸ Alasan perlunya mujtahid menguasa bahasa arab, menurut para ulama, karena al-Qur'an dan Hadits merupakan kitab syari'ah yang disampaikan dengan bahasa Arab. Bahkan, menurut mereka, beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits sendiri yang menunjukkan bahwa al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Dalam ayat al-Qur'an terdapat 14 ayat yang menjelaskan bahwa al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Keempat belas ayat tersebut masing-masing terdapat dalam surat *Yusuf* ayat 2, surat *ar-Ra'ad* ayat 37, surat *Ibrahim* ayat 14, surat *an-Nahl* ayat 103, surat *Maryam* ayat 97, surat *Thaha* ayat 113, surat *as-Syu'ara* ayat 195, surat *az-Zumar* ayat 18, surat *Fushilat* ayat 3 dan 44, surat *asy-Syura* ayat 7, syarat *az-Zukhruf* ayat 3, surat *ad-Dukhan* ayat 58 dan *al-Ahqaf* ayat 12.

³⁹ Muhammad Rasyid Ridla, *Al-Imamat al-Uzhma Mabahits Syar'iyat Ijtima'iyat Ishlahiyyat*, (Mesir: Mathba'at al-Manar, 1341), h. 87.

khususnya bahasa (*lughah*) pada era modern ini semakin menyempit, maka kemampuan bahasa yang dimiliki oleh mujtahid tidak mestilah menguasai semua ranah bahasa sampai ke aspek-aspek yang paling rinci. Namun kemampuan minimal pada aspek-aspek pokok seperti, ilmu *qawa'id, nahu, sharaf, balaghah* dan lainnya mestilah dikuasai oleh seorang mujtahid.

d. Mengetahui al-Qur'an dan Sunnah

Di kalangan ulama ushul terdapat perbedaan pendapat tentang keharusan mujtahid mengetahui al-Qur'an. Ibnu al-Humam (750H/1349M-808H/1405M), salah seorang ulama Ushul Fiqh *Hanafiyyat*, menjelaskan bahwa mengetahui al-Qur'an dan Sunnah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh mujtahid⁴⁰.

Imam Syafi'i, pendiri madzhab al-Syafi'i mensyaratkan seorang mujtahid berkemampuan menghafal seluruh al-Qur'an. Sebagian ulama, termasuk Imam al-Ghazali, salah seorang ulama penganut mazhab Syafi'i, tidak mensyaratkan seluruh al-Qur'an dihafal tetapi cukup dengan mengetahui ayat-ayat hukum yang jumlahnya sekitar 500 ayat, sehingga kapan saja saatnya mujtahid dapat merujuk pada ayat-ayat tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh al-Ghazali, tidak mensyaratkan menghafal 500 ayat di luar kepala tetapi cukup dengan mengetahui tempat-tempat (surat-surat) di mana posisi ayat-ayat itu berada⁴¹.

Secara ideal para mujtahid selayaknya dapat menghafal seluruh ayat al-Qur'an tetapi dalam kehidupan yang sudah demikian maju dengan tersedianya sumber-sumber buku, seperti kitab tafsir *ayat al-ahkam* dan kitab-kitab lain yang bertalian dengan masalah *ulum al-Qur'an*, para mujtahid tidak perlu secara mutlak dibebani menghafal seluruh al-Qur'an ketika akan mengalami kesulitan. Sementara persoalan-persoalan baru yang terus bermunculan tidak dapat dipecahkan dengan cepat.

Dengan tidak dikuasainya seluruh ayat al-Qur'an oleh mujtahid tidak berarti menentang prinsip persyaratan kemampuan menghafal al-Quran dalam berijtihad. Karena yang dibutuhkan dalam ijtihad adalah kemampuan mujtahid memecahkan objek permasalahan sejalan dengan pengetahuannya dalam menangkap maksud yang terkandung dalam al-Qur'an. Jadi, yang penting bukan menghafal al-Qur'an di luar kepala tetapi mujtahid mestilah mempunyai kemampuan metodologis dalam menangkap makna (pesan) al-Qur'an yang dijadikan sumber *istinbath*, dan dapat dibantu dengan teknologi informatika yang ada di era modern ini.

Sehubungan dengan persyaratan pengetahuan mujtahid terhadap al-Qur'an, Abu Bakar pernah tidak menjawab seluruh pertanyaan mengenai penafsiran beberapa ayat al-Qur'an. Antara lain, ayat yang ditanyakan adalah tentang penafsiran kata "*aba*" dalam firman Allah "*wa fakihatan wa aba*" yang terdapat dalam surat '*Abasa*' ayat 31. Ketika yang bertanya meronta Abu Bakar agar menjawabnya, malah ia balik

⁴⁰Ibnu Amir al-Hajj, *At-Tahrîr wa at-Tadbîr fî 'ilm al-Ushûl* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1417 H/1996 M), h. 389.

⁴¹Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, h. 1044.

bertanya seraya mengatakan; "Langit mana yang akan melindungi dan bumi mana pula yang akan menampungku, jika aku mengatakan tentang sesuatu dalam firman Allah padahal aku sendiri tidak mengatahuinya"⁴².

Betapa pun Abu Bakar seorang sahabat Nabi yang tidak diragukan kredibilitas ilmu pengetahuan agamanya, namun dalam konteks peristiwa di atas tidak dapat dimaknai sebagai keganjilan Abu Bakar dalam hal memberikan jawaban. Peristiwa ini tampaknya mengisyaratkan bahwa dalam kondisi tertentu Abu Bakar tidak sanggup mengetahui maksud dari seluruh ayat al-Qur'an. Akan tetapi eksistensi ijtihad tetap harus diperankan untuk memecahkan persoalan hukum. Oleh karena itu, dapat dipahami jika para ulama ushul tidak membebani mujtahid harus mampu mengetahui seluruh makna ayat al-Qur'an.⁴³ Pandangan ini dikemukakan oleh Ali Hasaballah (Guru Besar Ushul Fiqh Universitas Cairo Mesir) karena ia tidak ingin ijtihad mengalami jalan buntu. Ijtihad harus berjalan secara dinamik dan cepat dalam menjawab persoalan-persoalan dan memfatwakan masalah hukum⁴⁴.

Senada dengan Ali Hasaballah, Wahhab Khallaf⁴⁵ (ahli Ushul Mesir, lahir, 1888) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keharusan mengetahui Qur'an bagi mujtahid adalah kemampuannya dalam memahami syari'ah, mengetahui ayat-ayat hukum dan cara pengambilannya sehingga bila kepadanya dihadapkan peristiwa hukum, mujtahid tidak mengalami kesulitan menyampaikan ayat-ayat hukum yang berhubungan dengan peristiwa tersebut.

Pengetahuan tentang sunnah, menurut Wahbah Zuhaili,⁴⁶ (guru besar di Damascus, lahir 1351H/1932M di Syiria) sebagaimana halnya dengan al-Qur'an, mujtahid harus mengetahui sunnah baik bahasa maupun kandungan hukumnya tetapi tidak harus menghafal seluruh hadits. Hanya saja ia harus berkemampuan merujuk kepada hadits yang dijadikan acuannya ketika melakukan *istinbath* hukum, yaitu dengan mengetahui letak hadits melalui kamus hadits.

Al-Syaukani (1172H/1759-1250H/1834M) berpendapat, seorang mujtahid harus mengetahui sunnah sebanyak-banyaknya. Ia mengemukakan beberapa pendapat ulama tentang jumlah hadits yang harus diketahui oleh seorang mujtahid. Satu pendapat menyatakan bahwa seorang mujtahid harus mengetahui 500 hadits. Pendapat lain, termasuk Ibnu al-Dharir dan Ahmad Ibnu Hanbal, menjelaskan bahwa seorang mujtahid harus mengetahui lima ratus ribu hadits. Akan tetapi,

⁴² Al-Gazali, op.cit, h. 479.

⁴³ Menurut Ali Hasaballah, seorang mujtahid tidak disyaratkan dengan mutlak menghafal seluruh ayat yang diturunkan oleh Allah SWT tetapi cukup mengetahui aspek-aspek ayat yang terkait dengan objek pembahasan ijtihad. {Lihat; Ali Hasaballah, *Ushûl at-Tasyrî' al-Islâmî*, (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1391 H /1971 M), h. 96}. Pendapat ini senada dengan Imam al-Ghazali yang telah diuraikan diatas.

⁴⁴ Dalam pandangan Ali Hasaballah seorang mujtahid tidak seharusnya diklaim sebagai mujtahid dalam masalah ini tetapi bukan dalam masalah itu. Seorang mujtahid hendaknya lebih menguasai dengan luas sebagian objek-objek permasalahan dari pada yang lain sehingga ia dapat melakukan ijtihadnya dengan mudah; dalam hal ini mujtahid tidak dilarang berhenti atau takut salah dalam berijtihad dan memberi fatwa bila tidak dijumpai dalilnya. Contohnya adalah ketika Imam Malik ditanya mengenai empat puluh persoalan, ia hanya mampu menjawab empat persoalan, yang tiga puluh enam dijawabnya dengan tidak tahu. (Lihat Ali Hasaballah, *Ibid.*, h. 98.)

⁴⁵ Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, h. 218.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, op.cit., h. 1045.

menurut al-Ghazali dan beberapa ulama ushul, seorang mujtahid cukup dengan mengetahui hadits-hadits hukum yang terdapat, misalnya, dalam kitab *Sunan Abi Daud* dan *Sunan al-Baihaqi*.

Akan tetapi pendapat tersebut – sebagai dikutip oleh al-Syaukani – dibantah oleh Nawawi (w. 676 H), salah seorang ulama Fiqh Syafi'i. Menurut Nawawi, Sunan Abi Daud tidak dapat dijadikan tolok ukur sebagai kitab setandar berijtihad karena di dalamnya terdapat hadits-hadits hukum yang tidak valid dan hadits-hadits Bukhari dan Muslim yang selama ini dipandang valid (*shahih*) banyak yang tidak terdapat dalam Sunan Abi Daud.⁴⁷

Mengetahui sebab *wurud* suatu hadits sangat diperlukan untuk dapat mengetahui hadits baik secara tektual maupun secara kontekstual. Pengetahuan tentang *asbab al-wurud* ini dirasakan lebih penting di dalam upaya memahami hadits-hadits hukum, sekalipun tidak semua hadits Nabi mempunyai *asbab al-wurud*-nya. Hal ini disebabkan bahwa kandungan hadits untuk sebagian bersifat kondisional dan local, pada sebagian penjelmaan nabi yang empirik dari kandungan hukum al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam. Penjelmaan nabi tersebut dipandang sebagai fakta sosiologis yang lebih kuat dari pada fakta sosiologis umumnya karena ia dijemakan oleh seorang yang terbebas dari kesalahan (*ma'shum*). Menurut Fazlurrahman, seorang nabi adalah seorang yang keseluruhan waktu dan perilaku aktualnya jauh lebih tinggi dari manusia pada umumnya⁴⁸. Oleh karena itu, pengetahuan *wurud al-hadits* merupakan keniscayaan bagi seorang yang akan melakukan ijtihad.

e. Mengetahui Posisi Ijma' dan Ikhtilaf

Mengetahui seluruh masalah yang hukumnya telah dijelaskan oleh ijma' bagi seorang mujtahid merupakan suatu kemestian. Menurut Abu Zahrah (w. 1394H/1974M), keberadaan ijma' tidak diragukan lagi dalam menyelesaikan kasus hukum yang muncul seperti yang berhubungan dengan hukum-hukum waris dan persoalan wanita yang dilarang oleh al-Qur'an maupun hadits yang telah disepakati oleh ijma'. Demikian pula ketetapan-ketetapan agama sejak masa sahabat hingga para Imam Mujtahid dan generasi penerusnya yang telah menjadi ijma' para ulama⁴⁹.

Pengetahuan mujtahid pada ijma' di atas bukan dimaksudkan sebagai pegangan yang selalu dimenangkan dalam segala situasi tetapi merupakan bahan kajian guna mengetahui seluruh masalah yang telah dilahirkan oleh ijma'.

⁴⁷ Muhammad Ibn 'Ali al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 250.

⁴⁸ Fazlurrahman, *Islam*, (London: The University of Chicago, 1979), h. 53.

⁴⁹ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr al-Arabi: tt), h. 383. Mengenai ijma' ini di antara para kelompok muslim telah terjadi perselisihan pendapat; ada yang menolak dan ada yang menerimanya sebagai hujjah. Menurut Bazdawi orang-orang yang mengandalkan nafsu tidak menjadikan ijma' sebagai hujjah yang kuat. Sedangkan menurut al-Amidi sebagian besar umat Islam telah sepakat bahwa ijma merupakan dasar hukum kuat yang wajib diamalkan oleh setiap muslim. Hal ini berbeda dengan pandangan golongan Syi'ah, Khawarij dan Mu'tazilah. Lihat Ali Abd Razaq, *al-Ijma' fi as-Syari'at al-Islamiyyat* (Mesir: Dar- al-Fikr al-'Arabi, t.th.), h. 25.

Di samping perlunya mujtahid mengetahui letak *ijma'* yang telah disepakati para ulama salaf, seorang mujtahid diharuskan juga mengetahui *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) yang terjadi di antara para *fuqaha*. Misalnya mengetahui perbedaan pendapat dan metoda antara ulama fiqh di Madinah dan ulama fiqh di Irak. Dengan demikian mujtahid secara logis akan mampu memilah mana pendapat yang dianggap valid dan yang tidak, serta kebergayutannya dengan sumber al-Qur'an dan hadits.

"Mengetahui khilafiyah menurut Imam Syafi'i tidak dilarang karena dengan itu, bisa mengingatkan seorang mujtahid untuk tidak meninggalkan hal-hal yang terlupakan dan dapat memperkokoh keyakinan terhadap ketetapan suatu perkara yang dianggapnya benar. Dengan cara begitu ia bisa sampai pada puncak ijtihadnya dengan mengetahui kehujjahan hasil ijtihadnya sendiridan mengetahui *manhaj* yang digunakan dan dari sudut mana ia meninggalkan pendapat orang lain. Dengan cara itu, seorang juga dapat mengetahui kelebihan dari pendapat yang diambil dibanding dengan pendapat yang ditinggalkan"⁵⁰.

Imam Syafi'i terlihat telah menanamkan sikap keterbukaan kaum intelektual, khususnya kepada para mujtahid guna dapat mendengarkan dan menerima berbagai pendapat dari luar. Pengetahuan mujtahid yang sangat luas, terutama pengetahuannya tentang berbagai pendapat ulama di bidang hukum (*ikhtilaf*), merupakan modal bagi mujtahid di dalam menggerakkan mesin ijtihad.

f. Mengetahui Qias

Mujtahid yang ingin melahirkan qiyas, menurut Abu Zahrah⁵¹ (w.1394H/1974M), diperlukan mengetahui tiga hal:

- 1). Mengetahui seluruh nash yang menjadi dasar hukum asal beserta '*illat-nya* untuk dapat menghubungkan dengan hukum *furu'* (cabang).
- 2). Mengetahui aturan-aturan qiyas dan batas-batasnya, seperti tidak boleh mengqiyaskan dengan sesuatu yang tidak bisa direntang hukumnya, serta sifat-sifat '*illat* sebagai dasar qiyas dan faktor yang menghubungkan dengan *furu'*.
- 3). Mengetahui metode yang dipakai oleh ulama *salaf al-shaleh* dalam mengetahui '*illat-illat-nya* hukum dan sifat-sifat yang dipandang sebagai prinsip penetapan dan penggalan hukum fiqh.

g. Persyaratan lainnya.

Di luar syarat-syarat yang telah dikemukakan di atas, terdapat pula syarat lain bagi mujtahid baik yang disepakati oleh ulama ushul maupun yang telah diperselisihkan. Penulis buku *al-Ijtihad* (Sayyid Muhammad Musa), dengan sistematis telah mengelompokkan syarat-syarat ijtihad ke dalam beberapa poin berikut di bawah ini:

⁵⁰ Imam Syafi'i dalam kitab risalah memaparkan penjelasan tentang ikhtilaf dengan panjang lebar dalam bab khusus berjudul bab al-Ikhtilaf. {Lihat Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *ar-Risalat* (Maktabat Dar al- Tsaqafat: t.p., t.th), h.244-245.}

⁵¹ Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 385.

Pertama, persyaratan umum (*al-syuruth al-'ammat*), yang mencakup syarat balig, berakal sehat, kuat daya nalar, dan mukmin. *Kedua*, persyaratan pokok (*al-syuruth al-asasiyyat*), yang merupakan syarat-syarat pokok yang menekan mujtahid supaya mempunyai kemampuan cakap di bidang mengetahui al-Qur'an, memahami sunnah, memahami maksud-maksud hukum syari'ah dan mengetahui kaidah-kaidah umum (*al-qawa'id al-kulliyat*) hukum Islam.

Ketiga, persyaratan penting (*al-syuruth al-hammat*), merupakan syarat penting yang harus dimiliki mujtahid. Syarat-syarat dimaksud adalah menguasai bahasa Arab, mengetahui ilmu ushul Fiqh, mengetahui ilmu matik atau logika, dan mengetahui hukum asal (*al-bara'at al-ashliyyat*).

Keempat, persyaratan pelengkap (*al-syuruth al-takmiliyyat*). Syarat ini menetapkan agar mujtahid tidak berijtihad tentang masalah yang sudah ada dalilnya secara *qath'i*, mengetahui posisi *khilafiyyat*, dan menjaga ketakwaan dan keshalehan⁵².

Syarat-syarat ijtihad yang dikemukakan di atas, tampaknya dapat mengangkat seorang berpredikat mujtahid manakala seluruh syarat tadi dikuasainya dengan mendalam. Hal ini diakui oleh ulama ushul bahwa hanya dengan persyaratan yang demikian seseorang menyandang gelar mujtahid. Namun dalam katagori ulama ushul, dari sisi peringkatnya dalam diri mujtahid terdapat perbedaan dari yang terendah hingga yang tertinggi.

3. Macam-macam Ijtihad dan level Mujtahid

Ijtihad dilihat dari jumlah pelakunya dapat dibagi kepada dua yaitu; ijtihad *jama'i* dan ijtihad *fardhi*. Ijtihad *jama'i* adalah ijtihad yang dilakukan secara bersama-sama'. Sedangkan ijtihad *fardhi* adalah ijtihad yang dilakukan secara personal atau hanya beberapa orang mujtahid.⁵³ Yang disebut terakhir ini memiliki level (penjenjangan) seperti dapat dilihat pada uraian berikut ini.

Di kalangan ulama yang melakukan ijtihad, ada beberapa tingkatan mujtahid⁵⁴. Tingkatan itu tergantung pada aktivitas yang dilakukan oleh mujtahid itu sendiri. Tingkatan-tingkatan di kalangan mujtahid sebagaimana terdapat dalam kitab, *al-Ijtihad wa Muqtadhiyat al-Ashr* yang ditulis oleh Muhammad Hisyam al-Ayyubi adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Mujtahid *mustaqil* (mujtahid independen),⁵⁶ yaitu mujtahid yang membangun teori dan kaidah *istinbath* yang ditemukan dan diciptakannya sendiri langsung dari

⁵²Sayyid Muhammad Musa, *Al-Ijtihâd*, h. 160-202.

⁵³Abû Zahrah, *Op. Cit.*, h. 379

⁵⁴Tingkatan-tingkatan mujtahid sebagaimana yang ada sekarang adalah hasil kreatifitas para ulama sesudah imam-imam madzhab sekitar abad kelima hijriyah. (Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004, h. 111

⁵⁵ Muhammad Hisyâm al-Ayyûbî, *al-Ijtihâd wa Muqtadhiyât al-'Ashr*, (Amman: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 35. (t.tp.: Dâr al-Nahdhoh al-'Arabiyyah,

1984), cet. Ke-1, h. 135

⁵⁶Mereka yang termasuk dalam jajaran ini misalnya; Ibrâhim al-Nakha'î (w. 95 H), Abû Hanîfah (w. 150 H), Mâlik Ibn Anas (w. 179 H), Muhammad ibn Idrîs al-Syâfi'î (w. 204 H), Ahmad Ibn Hanbal (w. 241 H) dan lainnya. Lihat: Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002,

sumber hukum yang terpokok (al-Qur'an dan Sunnah), tanpa bersandar kepada kaidah *istinbath* pihak lain. Mujtahid *mustaqil* ini lazim disebut dengan istilah mujtahid *mutlak*. Senada dengan pendapat diatas Wahbah al-Zuhaili menamakannya dengan *al-Mujtahid al-Mustaqil*, yaitu mujtahid yang mendirikan fiqh atas dasar metode dan kaidah yang ditetapkannya sendiri. Atau dengan rumusan lain ia adalah mujtahid yang telah memiliki ushul fiqh dan fiqh sendiri, yang tidak sama dengan ushul fiqh dan fiqh yang dibangun oleh mujtahid lain. Imam empat adalah contoh mujtahid yang tergolong dalam kategori ini⁵⁷.

- b. Mujtahid *Muthlaq Ghair al-Mustaqil*, ialah mujtahid yang mencakup kriteria (syarat-syarat) berijtihad tetapi metode yang digunakannya terikat pada imam yang dianutnya. Mujtahid level ini, walaupun terikat pada salah satu metode madzhab dalam melakukan ijtihad, ia tidak terpengaruh oleh Imam Madzhab tersebut. Dengan kata lain, ia adalah tingkatan mujtahid yang memiliki fiqh sendiri, tetapi tidak memiliki ushul fiqh..⁵⁸
- c. Mujtahid *muntasib* (mujtahid berafiliasi), yaitu para mujtahid yang melakukan ijtihad dengan menggunakan kaidah *istinbath* tokoh madzhab yang diikutinya, meskipun dalam masalah-masalah *furu'* dia terkadang berbeda dengan imam yang diikutinya⁵⁹..

Ibnu Qayyim al-Jauziyyat menamakan ijtihad ini dengan *mujtahid muqayyad*. Ia mengetahui fatwa, perkataan, sumber dan metode ijtihad imam yang dianutnya. Bahkan ia sanggup berijtihad tentang peristiwa-peristiwa baru yang oleh imam yang dianutnya belum dijumpai pemecahan hukumnya sehingga memungkinkan ia tidak mengikuti ijtihad imamnya. Akan tetapi, ia tetap berpola dan memberikan fatwa berdasarkan metode ijtihad imamnya⁶⁰.

- d. Mujtahid *fi al-madzhab* sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyat bahwa mujtahid ini mengaitkan dirinya pada suatu madzhab tertentu. Mujtahid pada level ini sangat mengenal dalil dan fatwa-fatwa imamnya. Ia tidak lepas dari apa yang telah digariskan oleh imamnya. Oleh karena itu, ia tidak perlu mengetahui al-Qur'an, sunnah dan konstelasi bahasa Arab, karena mengenai kasusnya telah merasa cukup dengan apa yang telah digariskan oleh imamnya⁶¹.

h. 70. Dan Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syalthut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), cet. Ke-1, h. 37

⁵⁷Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, h.1080

⁵⁸Contoh mujtahid dalam tingkatan ini, antara lain, Abu Yusuf (113-183 H), Muhammad (132-189 H), dan Zufar (110-157 H), pengikut Abu Hanifah; Ibn al-Qasim (w. 191 H) dan Asyhab (140-204 H) dari pengikut Malik, al-Buwaethi (w. 231 H), az-Za'farani (w. 306 H), al-Muzani (175-264 H) dari kalangan pengikut as-Syafi'i (Lihat: *Ibid.*)

⁵⁹Di antara mereka yang termasuk tingkatan ini adalah; Muhammad ibn Hasan al-Syaibani (w. 189 H) dari kalangan Hanafiyah, Abd al-Rahman ibn Qasim (w. 191 H) dari kalangan Malikiyyah, al-Muzani (w. 624 H) dari kalangan Syafi'iyyah, dan Ibn Taimiyyah (w. 728 H) dari kalangan Hanabilah (Lihat: *Ibid.*)

⁶⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyat, *op.cit.*

⁶¹*Ibid.*

Selaras dengan kategori diatas, dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhali yang disebutkan dengan, *al-Mujtahid al-Muqayyad* atau *al-Mujtahid al-Takhrij*, yaitu seseorang yang telah memenuhi kriteria berijtihad dan mampu menggali hukum dari sumbernya. Walaupun ia(mujtahid)yang tidak menginginkan keluar dari dalil-dalil dan pandangan imamnya, namun ia tetap berupaya meng-istinbathkan hukumnya.⁶²

- e. Mujtahid *at-Tarjih*, yaitu pakar fiqh yang dengan sungguh-sungguh mempertahankan madzab imamnya dengan mengetahui konstelasi pandangan imamnya, dan mampu men-tarjih-kan pendapat yang kuat dari imam dan pendapat-pendapat yang terdapat dalam madzhabnya.⁶³

Abu Zahrah menyebutnya dengan mujtahid *murajjih*, yaitu mujtahid yang tidak meng-istinbathkan hukum *furu'*, mereka melakukan ijtihad hanya terbatas membandingkan beberapa pemikiran hukum mujtahid sebelumnya, kemudian memilih salah satu pendapat yang dianggap paling kuat (*arjah*) dan sesuai dengan kondisi zamannya.⁶⁴

- f. Mujtahid *al-Fatwa* ialah pakar fiqh yang berusaha memelihara mazhabnya, mengembangkan dan mengetahui seluk-beluknya serta mampu memberikan fatwa dalam koridor yang telah ditetapkan oleh Imam Mazhabnya, tetapi tidak mampu ber-istidlal.⁶⁵

I. Ranah dan kekuatan hukum Ijtihad

Ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid adalah dalam semua ketentuan hukum syar'i (sah secara agama) yang tidak mempunyai dalil qath'i

(كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعى و المجتهد فيه) Disini ketentuan hukum syar'i dibedakan dari ketentuan *aqliyyat* dan masalah kalam (teologi)⁶⁶.

Ketentuan hukum yang dimaksud adalah mengenai masalah-masalah yang tidak mendapat dosa bila ijtihad dilakukan. Sebaliknya, dalam masalah-masalah yang mempunyai dalil *qath'i*, maka ijtihad tidak dapat dilakukan, dan bila salah dalam hal itu mendapat dosa⁶⁷

Al-Gazali mengatakan bahwa seorang mujtahid harus mempunyai kemampuan intelektual untuk memahami syara' sehingga ia dapat membangkitkan stimulus *zhan* (opini yang lebih dekat kepada kebenaran) dengan mengamati permasalahan, mendahulukan apa yang harus didahulukan dan mengakhirkan apa yang harus diakhirkan. Ia juga merupakan seorang adil yang menjauhi kemaksiatan agar fatwa

⁶²Di antara mujtahid yang tergolong pada peringkat ini ialah; Hasan ibn Ziyad (w. 240 H.), al-Karkhi (260-340 H), al-Sarakhsi (w. 418 H) dari madzhab Hanafi; al-Abhari (w 395 H.) dan Ibn Abi Zaid (w. 386 H) dari madzhab Maliki; Abu Ishak al-Syirazi (w. 476 H.) dan al-Marwazi (w. 462 H.) dari Madzhab Syafi'i. (Lihat: Wahbah al-Zuaili, *op.cit*, h. 1080. Level mujtahid diatas dihimpun Wahbah Zuhaili dari tiga tokoh yaitu; al-Suyuthi, Ibnu al-Shalah dan al-Nawawi yang membaginya ke dalam lima tingkatan)

⁶³*Ibid.*

⁶⁴ Muhammad Abû Zahrah, *Op. Cit.*, h. 396

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, h. 1079-81.

⁶⁶ Abû Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazalî, *Al-Mustashfa fî 'ilmi 'ilmi 'l-Ushul*. Jilid II (Bairut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, reprint dari cetakan Mesir 1324 H), h.354.

⁶⁷*Ibid.*, h.356-358.

atau hasil ijtihadnya dapat diandalkan. Ijtihad atau fatwa orang yang tidak adil tidak dapat diterima. Penguasaan intelektual dan keharusan adil dijelaskan oleh al-Ghazali dalam delapan butir⁶⁸. Dua butir pertama merupakan pendahuluan; dua butir selanjutnya sebagai pelengkap; dan empat butir terakhir sebagai moderasi⁶⁹

Para ulama ushul fiqh berpendapat sama tentang ayat-ayat al-Quran atau hadis Rasulullah saw. yang tidak diragukan lagi kepastian hukumnya (*qath'iy fi al-tsubuth wa qath'i fi al-dilalah*) bukan lagi menjadi ranah ijtihad. Maksudnya adalah, ketika al-Quran dan hadis Nabi menginformasikan hukum yang dikandungnya secara tegas dan pasti, maka wilayah itu tidak lagi menjadi ranah ijtihad. Misalnya, kewajiban melaksanakan shalat lima waktu, kewajiban berpuasa, zakat, haji, larangan berzina, membunuh dan sebagainya.

Oleh karenanya ranah ijtihad itu seperti yang diungkapkan oleh al-Ghazali, bahwa ruang ijtihad itu adalah pada hukum *syar'i* yang tidak ditemukan dalil yang *qath'i* disitu⁷⁰, yang oleh Abdul Wahab Khalaf dibagi kepada tiga kategori yakni; *pertama*, hadis ahad yaitu hadis yang tingkat kepastian bahwa hadis dimaksud benar-benar dari Rasul baru sebatas dugaan kuat (*zanni*), karena berpeluang (walaupun sedikit) informasinya bukan dari Rasul. *Kedua*, lafaz-lafaz atau redaksi al-Quran atau Hadis yang informasi hukumnya tidak tegas sehingga dimungkinkan ada makna lain yang lebih kontekstual. Fungsi ijtihad disini adalah untuk mengetahui makna yang kontekstualistik, misalnya melalui pendekatan *asbab al-nuzul* dan atau pendekatan *asbab al-wurud*. *Ketiga*, masalah-masalah yang tidak ada teks ayat atau hadis atau ijma' yang menjelaskan hukumnya. Fungsi ijtihad disini adalah untuk meneliti dan menemukan hukum melalui *manhaj qias*, *istihsan*, *maslahah al-mursalah*, *'urf*, *istishab*, dan *sadd al-zari'ah*.

Bertolak dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa hukum yang dihasilkan oleh ijtihad dengan sendirinya bersifat *zhanni* bukan *qath'i*, karena hasil yang dicapai dari ijtihad itu adalah dugaan terkuat dari seseorang (mujtahid) yang boleh jadi belumlah persis sama dengan maksud Syari'. Sebagai implikasi logis kepada mujtahid tersebut, ia wajib mengamalkan dan berfatwa dengan hasil ijtihadnya, yang oleh Abu Husein (pengarang "*Kitab al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*"), mujtahid itu tidak boleh mengikuti mujtahid lain ketika ia telah melahirkan hasil ijtihadnya dalam suatu

⁶⁸Delapan butir yang dimaksud oleh al-Ghazali adalah; 1. Kitab (Qur'an): seorang mujtahid tidak diharuskan untuk mengetahui seluruh kandungannya, tetapi cukup hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan hukum saja... 2. Sunnah: (a) Ia harus mengetahui hadits-hadits yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan hukum, yang jumlahnya beribu-ribu. 3. Ijma (konsensus): Ia harus mengetahui dimana terdapat ijma sehingga dalam berfatwa ia tidak sampai menyalahi ijma.. 4. Akal. 5. Ia mengetahui dalil-dalil dan syarat-syaratnya sehingga mendapatkan keterangan dan dalil-dalil (البراهين والأدلة) yang dibutuhkan. 6. Ia mengetahui bahasa dan gramatika yang dibutuhkan untuk memahami ucapan orang arab serta kebiasaan mereka dalam menggunakan bahasa.. 7. Ia mengetahui perbedaan antara nashikh (teks pembatal) dan manshuk (teks yang dibatalkan) dalam kitab dan sunnah. Ia tidak harus menghafal semua ayat dan hadist mengenai ini, tetapi harus mengetahui mana ayat atau hadits yang nasikh atau mansukh. 8. Ia mengetahui perbedaan antara hadits shahih dan bukan shahih, yang diterima dikalangan ummat., (Lihat al- Ghazali, *Ibid.* Juz II, h. 100).

⁶⁹*Ibid.*, h. 350-351, 354.

⁷⁰*Ibid.*, h. 345

masalah⁷¹. Disamping itu hasil ijtihad tersebut juga mempunyai kekuatan mengikat bagi orang yang meminta fatwa karena mazhab orang yang meminta fatwa adalah pendapat mujtahid yang memberi fatwa.⁷²

Hasil ijtihad yang diproduksi mujtahid tidaklah mempunyai kekuatan mengikat bagi umat secara umum, (diluar mujtahid dan orang yang meminta fatwa) yang disebut diatas, karena hukum yang dilahirkan itu bersifat zhanni. Bahkan hasil ijtihad dimaksud dapat saja dikritik oleh mujtahid lainnya, atau oleh si mujathid yang melahirkan itu sendiri, seperti yang telah dilakukan oleh Imam al-Syafi'i yang populer disebut dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*.⁷³

J. Fatwa, Mufti dan Sejarah Perkembangan Fatwa.

1. Pengertian Fatwa

Secara etimologis kata fatwa merupakan bentuk mashdar dari kata *fatā yaftū* bermakna 'muda, baru, penjelasan, penerangan'.⁷⁴ Sedangkan menurut istilah, sebagaimana dinyatakan Yusuf Qardhawi, 'menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perorangan maupun kolektif'.⁷⁵

Berdasarkan beberapa keterangan diatas, Amir Syarifudin memberikan hakikat dan ciri-ciri tertentu dari berfatwa, yaitu; a. Berfatwa adalah usaha memberikan jawaban. b. Jawaban yang diberikan adalah tentang hukum Syara' melalui proses ijtihad. c. Yang menjawab adalah yang ahli dalam bidang yang dijawab. d. Jawaban diberikan pada yang belum tahu jawabannya⁷⁶.

2. Mufti

Dalam kajian ushul fiqh, dilihat dari segi produk hukum terdapat perbedaan antara mujtahid dengan mufti dan mufti dengan qadhi. Para mujtahid berupaya mengistinbathkan (menyimpulkan) hukum dari nash (al-Qur'an dan al-Hadits) dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain ataupun tidak. Sedangkan mufti tidak mengeluarkan fatwanya kecuali diminta dan persoalanyang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawabnya sesuai dengan pengetahuannya.

Mufti juga berbeda dengan hakim, sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan perbedaan antara mufti dan qadhi bahwa dilihat dari segi keselamatan maka seorang mufti lebih dekat pada selamat dan dilihat dari sudut kekuatan hukum

⁷¹ Abu Husin Muhammad bin Ali bin al-Thaiyib al-Bishri al-Mu'tazili, *Kitab al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, juz. 2 (Damaskus:t.t.) 1965, 932

⁷² Ibnu al-Subki, *Jam'u al-Jawami'* jilid 2 (Indonesia: Maktabah Dar al-Haya' al-Kutub al-Arabiya), tt. H. 395.

⁷³ Qaul Qadim adalah pendapat Imam al-Syafi'i yang bercorak ra'y, sedangkan qaul jadid adalah pendapatnya yang bercorak hadis, disebabkan temuannya mengenai hadis dan fikih yang diriwayatkan ulama Mesir yang tergolong kepada ahl al-hadis. {Lihat : Sya'ban Muhammad Ismail, al-Tasyri' al-Islami: Mashadiruh wa Athwaruh, (Qahirah: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1985), h. 337-338}.

⁷⁴ Ibn Manẓūr al-Ifriqy, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, 1990), J. XV, h. 147

⁷⁵ Yūsuf al-Qardawī, *al-Fatwā Bayn al-Indibaṭ wa al-Tasayyub*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5

⁷⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 2001) Jil. 2 h 429

dari produk hukum masing-masing maka mufti lebih ringan beban tanggung jawabnya. Fatwa seorang *mufti* sifatnya tidak mengikat *al-Mustafti*. Artinya, apabila seseorang meminta fatwa dan *mufti* memberikan solusi hukum maka *al-mustafti* boleh menerima dan mengamalkan fatwa tersebut tetapi dia juga boleh juga menolak serta tidak mengamalkannya. Ini berbeda dengan putusan yang diputuskan hakim. Putusan hakim tersebut mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak yang dihukum⁷⁷.

3. Sejarah dan Perkembangan Fatwa

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sangat mengutamakan fatwa sahabat setelah *nushush* dari pada dalil lain dalam berfatwa.⁷⁸ Oleh karena itu, dalam bagian ini, jelaskan perkembangan dan pengaruh fatwa sahabat terhadap hukum Islam. Sebelum mengetahui pengaruh fatwa sahabat terhadap perkembangan hukum, kita perlu mengetahui persoalan-persoalan penting yang dihadapi sahabat, diantaranya: a. Sahabat khawatir akan hilangnya al-Qur'an karena banyaknya sahabat yang gugur dalam perang melawan kaum kafir. b. Sahabat khawatir terjadinya ikhtilaf antar sahabat dalam masalah hukum seperti yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. c. Sahabat khawatir terjadi pemalsuan hadits atau sunnah Rasul Saw. d. Sahabat khawatir umat Islam menyimpang dari hukum Islam. e. Sahabat memerlukan jawaban atas hukum yang terjadi pada masa mereka yang belum di tegaskan oleh al-Qur'an dan Hadits.⁷⁹

Sebagai upaya dalam menjawab kekhawatiran tentang hilangnya al-Qur'an, Abu Bakar ra. atas usul dari Umar ra. mengumpulkan al-Qur'an dari bahan-bahan yang ada, yaitu hapalan dan catatan. Umar ra. mengusulkan untuk dibukukannya al-Qur'an karena umat Islam yang hapal al-Qur'an sudah banyak yang meninggal dalam peperangan, terutama dalam perang Yamamah.⁸⁰

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqî'in* menyebutkan para mufti dari mulai masa sahabat sampai masa tabi'in dan memilahnya sesuai dengan tempat tinggal masing-masing. Pembagian tersebut adalah, sahabat yang banyak mengeluarkan fatwa, sedang-sedang saja dan yang sedikit.⁸¹ Para ahli fikih dan mufti telah tersebar di berbagai wilayah Islam, diantaranya di Madinah al-Munawwarah,

⁷⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqî'in*Juz 1 h. 37. Perbedaan lain antara fatwa dengan qadla adalah pertimbangan hakim dicatat dan dipublikasikan sedangkan fatwa seorang mufti terkemuka dihimpun, dikutip dan disebarluaskan.

⁷⁸*Ibid.*, Jil.IV h. 393-405.

⁷⁹Umar Sulaiman al-Asqâr, *Tarîkh al-Fiqh al-Islâmi* (Amman, Dâr al-Nafâ'is; 1991) Jil. IV h. 63-64.

⁸⁰Awalnya Abû Bakar ra. Menolak karena Rasul Saw. tidak melakukan dan memerintahkannya. Akhirnya al-Qur'an disusun berdasarkan bahan-bahan yang ada, dan sahabat yang paling intens dalam pengumpulan al-Qur'an adalah Zaîd Bin Tsabits ra. karena ia adalah sekretaris Nabi Saw (Lihat: *Ibid.*, h. 66-67)

⁸¹Sahabat yang banyak mengeluarkan fatwa. Sahabat Rasul Saw. yang fatwanya teriwayatkan kurang lebih 130 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Diantara sahabat yang paling banyak mengeluarkan fatwa ada tujuh orang, yaitu: Umar ibn Khattab ra., Ali ibn Abi Thalib ra, Abdullah ibn Mas'ûd ra, Aisyah ra, Zaîd ibn Tsâbit, Abdullah ibn Abbas dan Abdullah bin Umar ra. (Lihat: Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam a-Muwaqî'in* Juz I h.25-31)

Mekkah, Bashrah, Kufah, Syam, Mesir, Qairawan, Andalusai (Spanyol), Yaman dan Baghdad.⁸²

Dapat ditambahkan kepada ahli-ahli fatwa Kufah adalah Abu Ubaidah dan Abdurrahman keduanya putera Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Abu Laila, dan ia belajar kepada lebih dari 100 orang sahabat, Jubair, Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar bin Abu Musa, Muharib bin Ditsar, Hakam bin Utaibah, Jabalah bin Suhaim, Hamad bin Abu Sulaiman, Sulaiman bin Al-Mu'tamir, Sulaiman Al-A'masy, Mis'ar bin Kidam, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Hasan bin Shalih bin Hay. Kemudian Hafsh bin Ghiyats, Waki' bin Al-Jarrah, sahabat-sahabat Abû Hanifah seperti Yusuf -seorang hakim-, Zufar bin Al-Hudzail, Hamad bin Abu Hanifah, Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i -seorang hakim-, Muhammad bin Hasan, Asad bin Amru, Nuh bin Diraj -seorang hakim-, dan sahabat-sahabat Sufyan Ats-Tsauri seperti Al-Asyja'i al-Mu'afi bin Imran, keduanya sahabat Hasan bin Hay Az-Zauli, Yahya bin Adam, dan lain-lain.

K. Taqlid dan Muqallid

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menguraikan posisi ijtihad, ittiba' dan taqlid dalam berfatwa memulainya dengan membagi mufti kepada empat golongan:

1. Mufti yang memahami kitabullah, sunnah Rasul Saw. serta pendapat para sahabat. Mereka adalah mujtahid dalam hukum-hukum yang sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Fatwa mujtahid seperti ini sering diikuti oleh mujtahid lainnya. Imam Syafi'i dalam masalah haji pernah berkata: "Aku berpendapat seperti ini karena aku mengikuti Imam Atha'." Mufti pada golongan pertama ini termasuk mereka yang diprediksikan akan memperbaharui agamanya setiap seratus tahun.
2. Mufti yang terikat dengan satu madzhab imam yang ia ikuti, yaitu mujtahid yang mengetahui fatwa-fatwa, pendapat dan dalil-dalil dari imam yang dikutinya. Karena penguasaannya terhadap isi fatwa dan metodenya dari imam yang diikuti, tetapi disertai keberanian untuk berbeda dengan pendapat imamnya, maka mujtahid kelompok kedua ini dianggap menetapkan fatwa baru pada suatu masalah berdasarkan pada apa yang telah diketahuinya dari Imam madzhabnya.
3. Mufti yang menggolongkan dirinya pada suatu madzhab dan menetapkan dalil suatu masalah pada madzhab yang dikutinya, menekuni fatwa-fatwa madzhab dan menguasai semua hal tentang fatwa madzhab tetapi tidak berani

⁸²Wilayah Sebaran Mufti. Para ahli fikih dan mufti telah tersebar di berbagai wilayah Islam, diantaranya di Madinah al-Munawwarah, Mekkah, Bashrah, Kufah, Syam, Mesir, Qairawan, Andalusai (Spanyol), Yaman dan Baghdad. (Lihat; *Ibid.*)

menentang atau melawan untuk berbeda pendapat dengan imamnya. Jika menemukan ketetapan dari imam maka tidak akan mencari pendapat lain. Menurut mereka semua masalah telah terjawab oleh para imamnya, sehingga kedudukan fatwa imam madzhabnya bagaikan *nash syar'i*.

4. Mufti yang memiliki pemahaman tentang beberapa madzhab para Imam secara luas tetapi mereka terpacu dengan pendapat imamnya tersebut, bahkan sampai mengabaikan dalil al-Qur'an dan sunnah Rasul Saw. untuk lebih memilih mendahulukan pendapat imam madzhabnya⁸³.

Dari keempat kelompok tersebut maka mufti terbagi kepada mufti mujtahid, mufti muntasib, mufti muqallid dan mufti bathil. Seorang mufti mujtahid harus berfatwa dengan hasil ijtihadnya, jangan dengan hasil ijtihad faqih yang lain⁸⁴.

Ijtihad adalah suatu proses yang memungkinkan adanya pengklasifikasian keahlian seseorang dalam melaksanakannya. Dengan demikian dimungkinkan adanya seseorang yang ahli dalam bidang ilmu tertentu dan tidak tahu atau bertaqlid dalam ilmu lain kepada orang lain.

Tentang apakah seorang imam muntasib (yang masih mengikuti salah satu imam madzhab) dibolehkan untuk berfatwa dengan pendapat dari imam lain? Dalam hal ini Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan gambaran bahwa seorang mufti tidak akan pernah lepas dari dua keadaan. *Pertama*; mufti akan ditanya tentang pendapat imam yang diikutinya saja? *Kedua*; mufti akan ditanya tentang hukum Allah yang di temukan berdasarkan hasil ijtihadnya?⁸⁵

Jika seorang mufti muntasib di tanya tentang pendapat imam yang diikutinya mengenai ketetapan hukum suatu masalah, maka hendaklah ia memberitahukan pendapat imamnya dan tidak boleh menggunakan pendapat lain kecuali hanya sebatas sebagai pembanding. Berbeda dengan jika seorang mufti muntasib di tanya tentang hukum sesuatu tanpa di tuntutan menggunakan pendapat ulama tertentu sebagai dalil, maka mufti tersebut memberikan fatwa dengan ketetapan hukum yang dianggap paling unggul menurutnya yang lebih sesuai dan lebih mendekati ketetapan al-Qur'an dan al-Sunnah, baik dari pendapat imamnya atau imam lain yang berbeda dengan imamnya.⁸⁶

Setiap orang tidak akan ditanya tentang imam, syaikh, atau yang lainnya serta yang disampaikan tetapi hanya di tanya tentang Rasul dan yang dibawanya. Dengan demikian seseorang tidak boleh terikat oleh pendapat satu madzhab tertentu terlebih jika di duga ada pendapat lain yang lebih kuat.⁸⁷ Keterikatan pada seorang imam terbatas pula dengan kenyataan bahwa seorang imam terkadang *meralat* pendapatnya

⁸³Ibid., Juz. IV h. 454 – 456

⁸⁴Ibid., h. 457.

⁸⁵Ibid., h. 472-473.

⁸⁶Ibid., h. 456

⁸⁷Ibid., h. 12

sendiri. Para pengikut imam banyak yang memberi fatwa dengan pendapat imam yang pertama, hal ini terjadi hampir disemua kalangan.⁸⁸

Mufti *muntasib* menurut Ibnu Qayyim boleh berpindah (berfatwa) dengan pendapat imam lain yang menurutnya lebih unggul. Jika terdapat qaul yang lebih unggul dari imam lain menurut seorang mufti berdasarkan dalil-dalil yang ada maka hendaklah mufti tersebut meninjau kembali kepada metode ushul fiqh dan *qawa'id* yang digunakan imam madzhab yang diikutinya. Hal ini tidak lain karena setiap imam madzhab pada dasarnya memiliki prinsip yang sama yaitu adanya keharusan mengikuti dan menggunakan pendapat yang unggul. Dengan demikian, jika ternyata terdapat satu pendapat dari imam lain yang lebih unggul maka seorang mufti diharuskan berfatwa dengan fatwa imam tersebut⁸⁹.

Mengenai berfatwa dengan menggunakan taqlid (mufti muqallid), Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan (mengikuti) pendapat imam Ahmad yang menyebutkan bahwa dalam masalah berfatwa dengan taqlid terdapat tiga kategori: *Pertama*; tidak boleh berfatwa menggunakan pendapat dari hasil taqlid, hal ini karena taqlid bukan merupakan pengetahuan (keilmuan), sedangkan berfatwa dengan tanpa ilmu hukumnya haram. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa taqlid bukanlah merupakan ilmu. Seorang muqallid tidak termasuk ilmuwan. Inilah pendapat kebanyakan pengikut imam Ahmad dan pendapat jumhur ulama. *Kedua*: dibolehkan berfatwa dengan hasil taqlid dalam hal yang berhubungan dengan masalah yang dialami oleh diri sendiri. Seorang yang 'alim tidak boleh bertaqlid dalam berfatwa ketika memutuskan hukum yang terjadi pada orang lain⁹⁰. *Ketiga*: dibolehkan berfatwa dengan hasil taqlid jika dalam keadaan sangat mendesak dan tidak ada seorangpun yang berijtihad, inilah pendapat yang paling shahih⁹¹.

L. Penerapan Ijtihad dan Fatwa dalam masalah-masalah kontemporer

Bentuk Ijtihad Terhadap Masalah Kontemporer dapat dikemukakan sebagaimana al-Qardhawi menjelaskan sebagai berikut:⁹²

⁸⁸ Misalnya, pada madzhab Hanbali, mufti masih berpendapat bahwa talaq yang mabuk itu syah, padahal imam Hanbali telah meralatnya dan menyebut bahwa talaq ketika mabuk tidak syah. (Lihat; *Ibid.*, h. 475).

⁸⁹ *Ibid.*, h. 474

⁹⁰ Pendapat demikian sama dengan Ibn Bathah dan imam lain dari kalangan pengikut imam Ahmad. Al-Qadhi. (Lihat; Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqfi'in* Juz I h 44 dan Juz II h. 437 dan 447).

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Yûsuf al-Qardhâwî, *Madkhal Lî Dirâsah al-Syarî'ah al-Islâmiah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1991), h. 275, 276. Nama lengkapnya adalah Yûsuf 'Abdullah al-Qardhâwî. Ia digelar jugadengan "Abû Muhammad", karena anaknya yang terbesar bernama Muhammad. Yûsuf al-Qardhâwî dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 M di desa Shafah al-Turâb, daerah al-Mahallât al-Kubrâ yang termasuk ke dalam Provinsi al-Gharbiyah, Mesir. Ia adalah salah seorang ulama kontemporer yang sangat produktif dalam menulis kitab-kitab tentang keislaman sehingga beliau dikenal oleh dunia

Islam. Salah satu karyanya adalah; *Fiqh al-Zakâh, Fatâwâ Mu'âshirah*. Lihat Muhammad al-Ma'jûb, *'Ulamâ wa Mutafakkirîn 'Araftuhum*, (Beirut: Dâr al-Nafâis, 1997), h. 439

“ *Ijtihad* tidaklah berarti mengabaikan warisan fikih klasik atau tidak menghargainya dan tidak memanfaatkannya. Namun yang dimaksud dengan *ijtihad* adalah meliputi beberapa hal pokok berikut ini: Pertama, melakukan peninjauan kembali terhadap kekayaan warisan fikih klasik dari berbagai aliran (*madzhab*) dan berbagai pendapat yang terdapat (terutama pendapat sahabat dan *tabi'in*) sepanjang masa untuk diseleksi manakah pendapat yang lebih kuat dan lebih tepat untuk mewujudkan maksud-maksud syari'at, yang dapat merealisasikan kemaslahatan umat di zaman kita ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Kedua, kembali ke sumber asli, yakni nash al-Quran dan Sunnah Nabi, lalu memahaminya dengan baik dalam kerangka maksud-maksud syari'at secara umum. Ketiga, melakukan *ijtihad* terhadap berbagai masalah baru yang belum dikenal oleh para fuqaha terdahulu dan mereka belum pernah menetapkan hukum yang mirip (hampir sama) dengan masalah tersebut, yakni dengan menarik kesimpulan hukum yang relevan berdasarkan dalil-dalil syari'at”.

Menurut al-Qardhawi ada tiga bentuk *ijtihad* yang perlu dilakukan di zaman ini, pertama, *al-Ijtihad al-Intiqaiy* (الاجتهاد الانتقائي) (*ijtihad* komparatif selektif), yaitu dengan meneliti kembali (*re-ijtihad*) hasil *ijtihad* ulama-ulama terdahulu beserta dalil-dalilnya yang terdapat warisan fiqh klasik, lalu memperbandingkannya satu sama lain, kemudian memilih mana diantara pendapat-pendapat tersebut yang lebih kuat (*tarjih*). Kriteria (معیار الترجیح) yang digunakan untuk memilih pendapat yang terkuat tersebut menurutnya adalah:

- Pendapat tersebut hendaknya lebih cocok dengan kehidupan orang zaman sekarang (أن يكون أقرب إلى أحوالنا)
- Pendapat tersebut hendaknya lebih banyak memberikan rahmat bagi umat manusia (وأرفق بالناس)
- Pendapat tersebut hendaknya lebih dekat kepada kemudahan yang diberikan syari'at (وأقرب إلى اليسر الشريعة)
- Pendapat tersebut lebih utama dalam mewujudkan syari'at, memberikan kemaslahatan bagi makhluk dan menjauhkan mereka dari kerusakan

(وداء الخلق ومصلحهم قصد الشرع وأول ما يتحقق المفساد عنهم)⁹³

Kitab-kitab fiqh klasik yang diteliti kembali tidak terbatas pada kitab-kitab *madzhab* yang empat saja (*Hanafiah*, *Malikiah*, *Syafi'iah*, dan *Hanabilah*). Tetapi juga meninjau kembali hasil *ijtihad* para sahabat, *tabi'in* dan ulama *madzhab* lain. Misalnya *ijtihad* Sa'id bin al-Musayyab (w. 94H/713M), al-Awzâ'iy (w. 157H/774M), *madzhab* al-Zahiriyy seperti Daud bin 'Ali (w. 270H/884M) dan Ibn Hazm (w. 456H/1063M), dan sebagainya. Lebih dari itu, al-Qardhawi juga tidak membatasi dari pada hasil *ijtihad* *madzhab* fiqh dari kalangan sunniy (*ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah*) saja, ia juga meneliti pendapat-pendapat dari ulama *Syiah* (*al-Zaidiyah*) dan *al-Imamiyah*.⁹⁴

⁹³Yûsuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad fî al-Syari'ah al-Islamiyah ma'a Nazharât Tahliliyah fî al-Ijtihad al-Mu'ashir*, (Kuwait, Dar al-Qalam 1985), h. 115

⁹⁴Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), Juz I, h. 20

Dalam melakukan *ijtihad intiqaiy*, pendapat yang dipilih boleh saja pendapat madzhab Maliki dalam suatu masalah, sedangkan dalam masalah lain dipilih pendapat madzhab Hanafi, Syafi'i atau Hanbali, bahkan boleh saja dipilih pendapat diluar madzhab empat. Selain itu dalam sebagian masalah boleh saja diambil pendapat satu madzhab, sedangkan pada sebagian yang lain dipilih pendapat madzhab lain pula, hal ini tidak disebut "*talfiq*".⁹⁵ Karena *talfiq* yang dilarang adalah menambal sulam sebagian pendapat dengan pendapat yang lain bukan berdasarkan dalil, tetapi berdasarkan selera belaka, semata-mata bertaqlid, tidak memilih yang benar dan terkuat.⁹⁶

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa semua hasil ijtihad dari berbagai madzhab diletakkan pada posisi yang sejajar oleh al-Qardhawi. Pandangan seperti itu tidak dibangun atas dasar fanatik terhadap suatu madzhab tertentu (*al-ta'ashub al-madzhabiyy*). Karena setiap madzhab mempunyai kekurangan di samping kelebihan-kelebihannya. Kewajiban untuk mengikuti salah satu madzhab tertentu, dan mengukut salah satu pendapat tokoh masa lalu tanpa meneliti kembali dalil-dalil yang digunakannya merupakan penyebab kemunduran dan kemandegan berpikir. Kemudian hasil ijtihad ulama masa lalu masih bisa dijadikan objek ijtihad oleh ulama di zaman sekarang.

Selain itu, dapat pula dilihat sikap al-Qardhawi dalam menilai warisan fiqh klasik. Ia tetap menghargai hasil ijtihad ulama masa lalu dan berusaha mendayagunakannya secara selektif untuk memenuhi kebutuhan zaman sekarang. Sikap ini merupakan sikap moderat di antara dua sikap ekstrim lainnya. Sikap ekstrim pertama adalah adanya sebagian ulama yang terlalu mengagungkan warisan fiqh klasik. Menurut mereka, semua masalah yang muncul di zaman ini, atau masalah yang mirip (hampir sama) dengan masalah di zaman ini, sudah pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu yang tersimpan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Bila seorang rajin menelitinya, pasti akan dijumpai ketetapan hukumnya.

Sikap ekstrim kedua adalah adanya sebagian tokoh yang terlalu melecehkan warisan fiqh klasik. Menurut mereka warisan fiqh klasik merupakan produk ijtihad ulama madzhab abad ke II H yang hanya cocok untuk masa lalu. Untuk zaman modern ini semua pendapat mereka sudah *out of date* (ketinggalan zaman), karena itu perlu dilakukan ijtihad di zaman ini mulai dari nol. Selain itu, pemikiran ulama madzhab tersebut sebenarnya tidak termasuk kepada ajaran agama yang sacral (*ma'shum*), karena merupakan pemikiran manusia yang tidak terlepas dari kesalahan. Oleh sebab itu ijtihad di zaman ini harus merujuk langsung kepada al-Qur'an dan Sunnah saja.

Selanjutnya menurut al-Qardhawi, dalam memilih pendapat terkuat ketika melakukan *ijtihad intiqaiy*, seorang mujtahid kontemporer harus mempertimbangkan

⁹⁵ "*Talfiq*" menurut bahasa berarti menggabungkan ujung kain yang satu dengan ujung kain yang lain. Ulama lain membolehkan *talfiq*, karena tidak ada ayat al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang mewajibkan seseorang mengikuti madzhab tertentu. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Juz II, h. 1142-1148

⁹⁶ Al-Qardhawi, *al-Ijtihad*, h. 117

faktor-faktor lain, seperti; perubahan sosial politik pada tingkat nasional dan internasional, perkembangan ilmu pengetahuan modern, serta tuntutan dan kebutuhan zaman.⁹⁷

Tawaran al-Qardhawi ini patut untuk dipertimbangkan, karena seorang mujtahid tidak boleh menetapkan hukum dari belakang meja saja tanpa memperhatikan realitas sosial yang terjadi. Dan yang perlu diperhatikan pula bukan siapa yang mengatakannya, tetapi bagaimana dalil dan cara berpikirnya, bagaimana relevansinya dengan zaman sekarang, dan bagaimana pula hubungannya dengan *maqashid al-syari'ah*.

Sebagai contoh, dapat dikemukakan masalah yang berhubungan dengan talak atau perceraian. Menurut mayoritas ulama ahli fiqh termasuk madzhab yang empat, talak dinyatakan jatuh apabila diucapkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri, tanpa harus tergantung pada adanya saksi.⁹⁸ Akan tetapi menurut ahli fiqh dari kalangan Syi'ah, talak baru dianggap terjadi kalau disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.⁹⁹ Sepertinya untuk masa sekarang pendapat Syi'ah itu dengan segala modifikasinya lebih dapat diterima.

Di Indonesia, berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, talak baru dianggap terjadi kalau dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Ketentuan itu sebenarnya sejalan dengan tujuan disyariatkannya talak dalam Islam. Al-Qura'an baik secara langsung atau tidak, menyatakan bahwa talak merupakan "jalan terakhir" untuk menyelesaikan persoalan suami isteri. Hadits Nabi juga menguatkan pernyataan di atas bahwa talak itu termasuk perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Islam tidak menginginkan terjadinya perceraian, namun dalam keadaan tertentu hal itu dibenarkan. Sekiranya dalam pelaksanaan talak dipersyaratkan adanya saksi, seperti pendapat ahli fiqh Syi'ah, suami dimungkinkan untuk dapat berpikir dengan baik sebelum menjatuhkan talaknya. Tetapi jika tidak demikian, kemungkinan suami untuk menggunakan haknya, kapan dan dimana pun ia berada akan semakin besar.

Pemikiran al-Qardhawi tentang "*al-Ijtihad al-Intiqaiy*" tersebut terlihat masih kurang jelas batasannya. Maksudnya, bila ada suatu masalah yang akan ditetapkan hukumnya, lalu akan diteliti apakah masalah tersebut, atau yang mirip dengan masalah tersebut sudah pernah dibahas oleh ulama-ulama klasik atau belum? Untuk itu perlu diteliti kitab-kitab fiqh klasik, tetapi sejauh mana batas penelitian terhadap kitab-kitab itu, ini yang masih belum jelas. Karena kitab-kitab fiqh klasik dari berbagai madzhab itu sangat banyak jumlahnya, sampai akhir usia seseorang pun mungkin belum selesai ia mempelajari seluruh kitab tersebut.

Kesulitan ini mungkin dapat diatasi dengan merujuk kepada kitab-kitab perbandingan madzhab atau kitab tafsir ayat-ayat hukum dan hadits-hadits hukum yang menyebut perbedaan pendapat berbagai madzhab. Misalnya kitab "*al-Jami' li Ahkam al-*

⁹⁷ Al-Qardhawi, *al-Ijtihad*, h. 120-125

⁹⁸ Al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut, Dar al-'Ulum, 1988) Juz II, h. 227

⁹⁹ Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far al-Shadiq*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1978) Juz V, h. 12

Qur'an" karangan al-Qurthubi (w. 671H), "kitab *Nail al-Awthar*" karangan al-Syaukani (w. 1255H), kitab "*Subul al-Salam*" karangan al-Shan'aniy (w. 1182H), dan lainnya. Mungkin pula kesulitan itu dapat diatasi dengan memperhatikan daftar isi kitab-kitab fiqh klasik dan mencari tempat-tempat (topik-topik) yang diperkirakan membicarakan masalah yang sedang dibahas.

Mungkin pula batasannya sampai si mujtahid merasa tidak mungkin lagi mencurahkan kemampuannya karena telah dikerahkan secara optimal. Kesulitan untuk meneliti kitab-kitab fiqh klasik yang banyak jumlahnya itu dapat diatasi dengan apa yang disebut oleh al-Qardhawi sebagai "*Ijtihad Jama'iy*" (ijtihad kolektif) dalam bentuk lembaga ilmiah atau lembaga fatwa yang mengikut sertakan sejumlah ahli fiqh dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Bentuk *kedua* dari ijtihad terhadap permasalahan kontemporer adalah *ijtihad insyayy* (الاجتهاد الإنشائي) (Ijtihad konstruktif inovatif), yakni menetapkan hukum atas berbagai masalah baru yang belum pernah dikenal oleh ulama-ulama terdahulu karena memang belum ada pada zaman itu, atau dalam masalah lama tetapi mujtahid kontemporer mempunyai pendapat baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu.¹⁰⁰

Dalam menghadapi persoalan yang sama sekali baru, diperlukan pengetahuan yang sedang dibahas, disamping pengetahuan yang menjadi persyaratan ijtihad itu sendiri. Dalam hubungan ini, *ijtihad jama'iy* (ijtihad kolektif), sangat diperlukan¹⁰¹. Karena keterbatasan pengetahuan seseorang disertai semakin ketatnya disiplin ilmu pada masa sekarang ini, maka *ijtihad fardiy* (ijtihad perorangan) mengenai kasus yang sama sekali baru, kemungkinan besar akan membawa pada kekeliruan. Sebagai contoh dapat dikemukakan kasus pencangkakan jaringan atau organ tubuh manusia. Guna menetapkan hukumnya, perlu didengar lebih dahulu pendapat ahli dalam bidang kedokteran, khususnya ahli bedah. Setelah diketahui secara jelas perihal pencangkakan itu baru mulai dibahas dari berbagai disiplin ilmu agama Islam, untuk kemudian diambil kesimpulan hukumnya. Kegiatan ijtihad kolektif ini harus ditempuh, mengingat sudah semakin jelas dan tegasnya pembagian ilmu yang didalami oleh seseorang.

Adanya dua pendapat yang berbeda menunjukkan bahwa masalah itu merupakan masalah *ijtihadiyah* yang *interpretable* (*zhanniy*). Produk ulama masa lalu masih boleh dijadikan objek ijtihad oleh ulama yang datang kemudian. Apakah pendapat ketiga itu sesuai dengan kedua pendapat terdahulu, atau bertentangan, hal ini tidak menjadi masalah. Karena tidak ada keharusan bahwa hasil ijtihad yang muncul kemudian tidak boleh bertentangan dengan hasil ijtihad ulama-ulama terdahulu. Produk ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh produk ijtihad yang lain, masing-masing berlaku sesuai dengan masanya¹⁰² (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد). Dengan kata lain bahwa perubahan di dalam suatu masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Sementara itu mujtahid dimasanya berupaya keras mencurahkan kemampuannya untuk menyelesaikan kasus

¹⁰⁰ Al-Syâtibî, *al-Muwâfaqât*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Juz I, h. 126

¹⁰¹ Fathurrahman Djamil, *Ijtihad Muhammadiyah Dalam Masalah-Masalah Kontemporer*, (Jakarta, PPS, 1994), h. 54

¹⁰² *Ibid.*

hukum yang muncul dimasanya itu, sehingga ia dengan usaha keras itu memiliki *zhan* yang tinggi tentang putusan hukum yang dilahirkannya itu yang boleh jadi berbeda dengan hasil ijtihad ulama lainnya. Hasil *zhan* yang tinggi yang dilahirkan oleh mujtahid belakangan tidaklah memiliki kekuatan untuk membatalkan hasil ijtihad ulama sebelum dan selain dia.

M. Penutup

Ijtihad dapat dikatakan sebagai mesin penggerak dinamika hukum Islam dalam menyelesaikan fenomena hukum yang muncul sepanjang sejarah kehidupan manusia di bumi ini. Kegiatan ijtihad dapat dilakukan secara kolektif (ijtihad *jamma'y*) dan personal (ijtihad *fardy*) dengan pendekatan bayani maupun *ra'yi*.¹⁰³ Ijtihad merupakan sarana yang paling efektif untuk mendukung tetap tegak dan eksisnya hukum Islam serta menjadikannya sebagai tatanan hidup yang *up to date* yang sanggup menjawab tantangan zaman (*shalihun li kulli zaman wa makan*). Melakukan ijtihad bagi seorang mujtahid merupakan kewajiban yang dapat melahirkan produk hukum *taklifiyyah* dan *wadh'iyyah* pada ranah *zanni*. Ijtihad baru akan berfungsi dan berdayaguna jika ijtihad dilakukan oleh para ahlinya (mereka yang memenuhi persyaratan dan dilakukan pada tempatnya sesuai dengan ketentuan yang telah diakui kebenaran dan kesalahannya). Mujtahid disyaratkan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah dalam berbagai aspeknya, tarekh tasyri', memahami masalah yang sudah disepakati ulama, memahami bahasa Arab, dan mengetahui ushul fiqh dan lainnya. Ijtihad akan membawa keselamatan kejayaan bagi Islam dan umatnya, apabila hal itu dilakukan oleh yang memenuhi persyaratan dan dilakukan pada ranah diluar *nash* yang *qath'i*. Mujtahid secara sederhana dapat dibedakan pada mujtahid mutlaq dan mujtahid muntasib. Namun didalam perkembangannya dapat diturunkan kepada berbagai level seperti; mujtahid muthlaq ghairu mustaqil, mujtahid filmazhab, mujtahid tarjih dan mujtahid fatwa.

¹⁰³ Ijtihad bayani adalah penggalian hukum Islam dengan menganalisis lafadz-lafadz yang digunakan sebagai dalil, melalui pendekatan bahasa. Ijtihad al-Ra'yi dilakukan dengan menggunakan akal fikiran, baik dengan mengqiyaskan, istihsan, istishab, masalahah maupun yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amidi, Saif al-Din Abi al-Hasan 'Ali ibn 'Ali ibn Muhammad al-, *Al-Ihkam fî Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Arief, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syalthut*, Yogyakarta: LESFI, , cet. Ke-1, 2003.
- Ashfihani, al-Raghib al-, *Al-Mufradat fî Gharib al-Qur'an* Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.th.
- Asqar, Umar Sulaiman al-, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Amman, Dar al-Nafa'is; 1991.
- Ayyubi, Muhammad Hisyam al-, *al-Ijtihad wa Muqtadhiyat al-'Ashr*, Amman: Dâr al-Fikr, t.th.
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- , *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Baidhawi, al-, *Minhaj al-Wushul*, (t.t.),
- Basyir, Ahmad Azhar, "Pokok-Pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), t.t.
- Bukhari, Muhammad ibn Isma'il Abu Abdillah Al-, *al-Jami al-Shahih, Bab Ajr al-Hâkim idza Ijtahada Faashaba au Akhtha'a*, t.tp., tp., t.th, juz 9.
- , *Matan al-Bukharî bikhasiyat al-Sanad*, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, j. 2, 1414 H/1995 M.
- Darain, Fath al-, *al-Manahij al-Ushuliyyat fî al-ijtihad bi ar-Ra'y fî at-Tasyrî'*. Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975.
- Dawalibi, Muhammad Ma'ruf al-, *Al-Madkhal ila 'Ilmi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, , cet. Ke-3, 1999.
- , *Ijtihad Muhammadiyah Dalam Masalah-Masalah Kontemporer*, Jakarta, PPS, 1994.
- Fazlurrahman, *Islam*, London: The University of Chicago, 1979.
- Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al- *al-Mustasfa Min 'Ilmi al Ushul* Juz. 1; Dar al-Fikr Lithibaati Wa al-Nashr Wa Tausi', t.th.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang; 1987.
- Ghuddah, Abd al-Fattah Abu, *Al-Isnad min ad-Dîn wa Shafhat wa Musyriqat min Tarikh Sima al-Hadits 'Inda al-Muhadditsin* Damsyiq: Dar al-Qalam, 1412 H/1992.
- Hajj, Ibnu Amir al-, *At-Taqrir wa at-Tadir fî 'ilm al-Ushul* Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996 M.
- Hallaq, Wael B., *The Primacy of The Quran in Syatibi Legal Theory*, dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (ed) *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams* Leiden: EJ-Brill, 1991.
- Hasaballah, Ali, *Ushul at-Tasyrî' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1391 H /1971 M.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim al-, (Syams al-Din Abi 'Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr), *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, , juz III, 1996
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Maktabah al Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1956.
- Madkur, Muhammad Salam, *al-Ijtihad fî al-Tasyrî' al-Islami*, t.tp.: Dar al-Nahdhoh al-'Arabiyyah, , cet. Ke-1, 1984.
- , *Manahij al-Ijtihad fî al-Islam* Kuwait, Jami'ah al-Kuwait:1974.

- Mahmashani, Subhi, *Falsafat al-Tasyry fi al-Islam*, Beirut; Dar al-Ilmu al-Malayin; 1961.
- Mudzhar, H.M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhammad al-Ma'jub, *'Ulama wa Mutafakkirun 'Araftuhum*, Beirut: Dar al-Nafais, 1997.
- Mughniyah, Jawad, *Fiqh al-Imâm Ja'far al-Shadiq*, Beirut, Dar al-Fikr, 1978. Mu'tazili, Abu Husin Muhammad bin Ali bin al-Thaiyib al-Bishri al-, *Kitab al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, juz. 2, Damaskus: t.p., 1965
- Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-i, *Shahîh Muslim*, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, jld. 1, 1414 H/1993 M.,
- Nasution, Harun, "Dasar Pembaharuan dalam Islam", dalam M. Yunan Yusuf, dkk., (ed.), *Cita dan Citra Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Nawawi, Imam Abi Zakariya Muhyi al-Din Syaraf al-, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th. juz I. Nuruddin, Amiur, *Ijtihad Umar ibn al-Khaththab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Qardawy, Yusuf al-, *al-Fatwa Bayn al-Indibath wa al-Tasayyub*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- , *Madkhal Li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1991.
- , *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, Kuwait, Dar al-Qalam 1985.
- , *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.
- Qayyim, Ibnu al-Jauziyyat, *I'lâm al-Muwaqqi'în*, pada Maktabah Syamilah.
- Ridla, Muhammad Rasyid, *Al-Imamat al-Uzhma Mabahits Syar'iyyat Ijtima'iyyat Ishlahiyyat*, Mesir: Mathba'at al-Manar, 1341.
- , *Yusr al-Islam wa Ushul at-Tasyri' al-'Am*, Mesir: Mathba'at Nahdlat, 1375 H-1956 M.
- Razaq, Ali Abd, *al-Ijmâ' fi as-Syarî'at al-Islâmiyyat* Mesir: Dar- al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- Sabiq, al-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut, Dar al-'Ulum, 1988.
- Sarakhsi, Al-, *Ushul al-Sarakhsi*, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1372 H.
- Syariruddin, Amir, *Ushûl Fiqh*, Jakarta; Logos Wacana Ilmu, , Jild.2, 2001.
- Syaukani, Muhammad Ibn 'Ali al-, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dâr al-Fikr, tth.
- Wahidi, Al-, *Asbab an-Nuzul*, al-Qahirat: t.p., 1968
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zarqani, Muhammad Abd al-Azhim al-, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, al-Qahirat: Isa al-Babi al-Halabi, t.th.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.